

MEMORANDUM

AKHIR MASA JABATAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA
(1968 – 1978)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
18 SEPTEMBER 1978

MEMORANDUM
AKHIR MASA JABATAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA
(1968 – 1978)

DITERBITKAN OLEH PROYEK PEMBINAAN
TEKNIS DAN PENGENDALIAN KEBIJAKSANAAN
PROYEK-PROYEK KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18 SEPTEMBER 1978

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	5
II. TINJAUAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN (1968 — 1978)	6
1. Sejarah Terbentuknya Direktorat Jenderal Kebudayaan	6
2. Kebijakan Dasar Pengembangan Kebudayaan	10
3. Pelaksanaan Pengembangan Kebudayaan	24
III. PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN SELANJUTNYA .	46
1. Permasalahan Kebudayaan	46
2. Formulasi Pilihan Kebijakan	49
IV. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL	56
V. HARAPAN DAN SARAN	70
LAMPIRAN:	
1. Kegiatan Kebudayaan Ke Luar Negeri	74
2. Perkembangan Anggaran Rutin dan Pembangunan Bidang Kebudayaan	95
3. Hasil Pelaksanaan Repelita I & II	103
4. Rencana Anggaran Repelita III	104

**MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
(1968 - 1978)**

I. PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Jendral Kebudayaan untuk perioda tahun 1968 - 1978, maka disusunlah suatu memorandum. Adapun memorandum ini merupakan suatu laporan yang mencakup kebijakan dan pelaksanaan kegiatan selama masa jabatan berlangsung, sebagai suatu pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami sebagai pejabat pemerintah. Laporan ini dimaksudkan pula sebagai bahan informasi kepada pejabat baru mengenai masalah-masalah yang menyangkut aktivitas Direktorat Jendral Kebudayaan. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah pokok, pendekatan dan pemecahan serta pandangan ke depan. Dengan demikian pelestarian suatu usaha yang telah ditetapkan dapat dilakukan secara terus-menerus, sehingga diharapkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Berdasarkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan Direktur Jendral Kebudayaan dalam perioda tersebut, dapatlah digambarkan secara singkat dan menyeluruh mengenai perkembangan bidang kebudayaan selama itu.

Direktorat Jendral Kebudayaan sebagai suatu lembaga atau badan pemerintah yang bergerak menangani bidang kebudayaan, baru terbentuk pada tahun 1966. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 170/1966 dan Surat Keputusan Presiden Kabinet Ampera No. 75/Kep/11/1966, tanggal 3 Nopember 1966 tentang susunan organisasi Departemen di mana di dalamnya ada Direktorat Jendral. Departemen P & K mempunyai 5 Direktorat Jendral, dan salah satu di antaranya ialah Direktorat Jendral Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jendral.

Sebagai Direktur Jendral Kebudayaan yang pertama ditunjuk Bapak Indrisugondo yang pada waktu itu beliau menjabat Atase Kebudayaan Indonesia untuk Amerika Serikat. Masa jabatan beliau berakhir 1 Juni 1968. Sebagai Direktur Jendral Kebudayaan kedua berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 17/M/1968 ditunjuk Prof. Dr. L.B. Mantra, Rektor Universitas Udayana Bali.

II. TINJAUAN KEBIJAKAN

1. Sejarah Terbentuknya Direktorat Jenderal Kebudayaan

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia dilihat dari sudut kebudayaan merupakan bangsa yang memiliki kekayaan kebudayaan yang beraneka ragam, namun demikian menunjukkan kesatuannya yang khas yang diistilahkan dengan Bhineka Tunggal Ika. Pada mulanya pertumbuhan kebudayaan Indonesia tidaklah terhambat, namun setelah periode penjajahan hingga abad ke-20, iklim pertumbuhan menjadi sangat terhambat dan dijuruskan kepada kepentingan kaum penjajah. Dengan perkataan lain usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan boleh dikata tidak ada.

Meskipun pada masa sebelum kemerdekaan ada badan yang bergerak di bidang kebudayaan seperti Oudheidkundige Dienst, Koninklijk Bataviasch Genootschap dan Kantoor Voor Indlandse Zaken, namun semua ini adalah untuk kepentingan politik penjajahan.

Semangat Boedi Oetomo, 28 Oktober 1928 dan kemudian Taman Siswa pada hakekatnya adalah suatu manifestasi reaksi atas sikap penjajah terhadap kebudayaan Indonesia.

Penjajahan Jepang yang mengganti penjajahan Belanda merupakan periode baru yang secara tidak langsung membantu dan mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia. Keimin Bunka Sidhoso (Pusat Kebudayaan) yang bertujuan memajukan mutu seni dan kebudayaan Indonesia berdiri, di mana para seniman Indonesia menampilkan karya-karya mereka dalam membina identitas kebudayaan nasional.

Pada masa kemerdekaan, usaha kebudayaan secara administratif baru dimulai. Bermula dengan berdirinya Bagian Kebudayaan pada Kementerian PP & K, tahun 1946, yang di-

bentuk dengan SK. Menteri P dan K, No. 203 11 September 1946. Usahanya yang pertama adalah kadervorming dengan jalan kursus pegawai.

Perkembangan selanjutnya adalah:

1. Pada tahun 1948, Bagian Kebudayaan diganti dengan Bagian D, Surat Keputusan Menteri P P K No. 35571 D, tanggal 24 April 1948.

Usahanya adalah mempertinggi dan memelihara derajat kebudayaan umum dan kesenian bangsa Indonesia, memberi pimpinan, bantuan, bimbingan pada masyarakat dalam bidang kebudayaan dan kesenian dengan falsafahnya : "Tut wuri andayani, ing madya mbangun karsa, ing ngarsa asung tulada".

2. Pada tahun 1949, dibentuk Jawatan Kebudayaan dengan SK Menteri PP & K, No. 57/5 tanggal 5 Agustus 1949. Jawatan Kebudayaan yang menggantikan Bagian D, bertugas : mengurus dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan baik yang kuno maupun yang baru.
3. Pada tahun 1964 dengan meluasnya struktur organisasi, jawatan kebudayaan berubah menjadi Direktorat Kebudayaan, SK Menteri P D dan K No. 34/1964, tanggal 9 Mei 1964. Di samping Direktorat Kebudayaan tersebut ada pula Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan, dan Lembaga Museum Nasional.
4. Pada masa Kabinet Dwikora (1964 — 1966), Presiden menetapkan 3 orang Pembantu Menteri P D dan K, salah seorang adalah pembantu Menteri Bidang Kebudayaan (Ibu Lasmidjah Hardi), yang bertugas membantu Menteri serta berfungsi sebagai koordinator atas tugas-tugas atau kebijakan Menteri dalam bidang kebudayaan dan mengkoordinir Direktorat dan Lembaga yang ada.
5. Pada Keputusan Presiden No. 170/1966 dan Keputusan Presiden Kabinet Ampera No. 75/Kep./11/1966, tanggal 3 Nopember 1966, Departemen P dan K mempunyai lima (5) Direktorat Jenderal, salah satu adalah Direktorat

Jenderal Kebudayaan.

6. Dalam pada itu sebagai pelaksana kebudayaan di daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya dibentuk Inspeksi Daerah Kebudayaan, kemudian dengan berubah struktur organisasi Departemen, maka susunan organisasi di tingkat daerah dirubah menjadi Kantor Daerah Direktorat Jenderal Kebudayaan Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya yang masing-masing mempunyai daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
7. Pada tahun 1969 ada reorganisasi, yang dengan keputusan Presiden No. 39/1969 ditetapkan 5 Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen P dan K. Sebagai tindak lanjutnya Menteri mengeluarkan SK No. 34 dan 35/1969 yang menetapkan susunan Direktorat Jenderal Kebudayaan sbb :
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
 - b. Direktorat Kesenian,
 - c. Direktorat Pendidikan Kesenian,
 - d. Direktorat Museum,
 - e. Lembaga Bahasa Nasional,
 - f. Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional,
 - g. Lembaga Sejarah dan Antropologi,
 - h. Lembaga Muskologi dan Koreografi.

Bagi tingkat daerah dikoordinir oleh Kepala Perwakilan Departemen P dan K yang dibantu oleh asisten Kebudayaan. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis dilakukan oleh Kantor Pembinaan Kebudayaan dan Kantor Pembinaan Kesenian, Kantor Kesenian dan Kantor Pembinaan Museum. Untuk tingkat Kabupaten/Kodya dilaksanakan oleh Kantor Pembinaan Kebudayaan dan Kantor Pembinaan Pendidikan Kesenian.

8. Pada tahun 1975, struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan berubah berdasarkan SK. Menteri P dan K No. 079/O/75, tanggal 25 April 1975, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta perizinan di bidang kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menyelenggarakan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan hal tersebut struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah ditetapkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Direktorat Pembinaan Kesenian
3. Direktorat Pengembangan Kesenian
4. Direktorat Museum
5. Direktorat Sejarah dan Purbakala

Sedangkan di tingkat daerah propinsi dikoordinir oleh Kantor Wilayah dan secara teknis dilakukan oleh Kantor Bidang Kesenian dan Kantor Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.

Di tingkat kabupaten/kotamadya penyelenggaraan kebudayaan dilakukan oleh Seksi Kebudayaan, dan di kecamatan dilakukan oleh Penilik Kebudayaan.

10. Berdasarkan SK Menteri 079/0/75 pula, maka :
 - a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional
 - c. Pusat Penelitian Sejarah dan Budayadalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dengan gambaran organisasi di atas, dapat diketahui luas lingkup bidang yang ditangani Direktur Jenderal Kebudayaan. Dan dari perkembangan organisasinya yang selalu berubah dan berkembang itu menunjukkan betapa tuntutan kebudayaan bangsa semakin dinamis.

2. Kebijakan Dasar Pengembangan Kebudayaan

Pada hakekatnya kebudayaan tumbuh sesuai dengan situasi dan kondisi dari pada sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan itu sendiri. Karena itu kebudayaan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat, masyarakat dan negara.

Namun suatu kebijakan dasar diperlukan bagi tercapainya tujuan pembangunan di bidang kebudayaan dan suatu kebijakan kebudayaan yang mampu berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi suatu proses pembangunan di Indonesia, haruslah berdasarkan UUD '45 dan harus dijiwai oleh falsafah Pancasila, karena pembangunan itu sendiri berorientasi pada nilai-nilai yang menjiwei tindakan manusia.

Pemikiran ke arah kebijakan kebudayaan harus bersifat menyeluruh, meliputi suatu cara berfikir yang bersumber pada pandangan-pandangan tentang hidup, lingkungan serta manusia yang digali dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

Kebijakan kebudayaan hendaknya sesuai dengan azas wawasan Nusantara yang mencakup antara lain perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang berarti bahwa kebudayaan Indonesia pada hakekatnya adalah satu. Kesamaan warisan kejiwaan dan kebudayaan, juga kesamaan aspirasi sejarah dan semangat menunjukkan dengan jelas adanya kesatuan, keseragaman dan kesamaan yang diakui sebagai kebudayaan nasional, yang bercorak Bhineka Tunggal Ika. Corak ragam kebudayaan yang ada, menggambarkan kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia, yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa. Karena kebudayaan kita merupakan pengejawantahan dari manusia, dan selayaknya memberi makna serta keselarasan dalam kehidupan sehingga dengan demikian membahagiakan manusia. Kebudayaan

Indonesia hendaknya berjalan secara berkelanjutan dalam keseluruhan hidup masing-masing anggotanya dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga merupakan suatu kontinuitas budaya.

Mengingat hal-hal di atas, maka kebijakan kebudayaan tersebut harus dapat dipergunakan untuk memberikan petunjuk, baik di bidang operasional maupun administrasi serta pengembangan watak dan kepribadian Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Dan ini semua demi kelangsungan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara.

Kebudayaan adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang berisikan antara lain, moral, etik, sikap mental, tingkah laku, nilai-nilai hidup yang secara singkat dapat dikatakan : hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Nilai-nilai hidup tersebut bagi bangsa Indonesia didasari dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.

Pemberian bimbingan pengarah dan petunjuk hendaknya digali dari sumber-sumber kehidupan bangsa Indonesia (antara lain adat-istiadat) yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan tanpa menghilangkan identitas atau kepribadian bangsa Indonesia.

Di dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia sekaligus kita memberikan dorongan kepada bangsa Indonesia meningkatkan daya kreasinya dan daya seleksinya terhadap kebudayaan dari luar. Dan dengan demikian sekaligus memupuk ketahanan nasional. Untuk mendukung pengembangan kebudayaan perlu adanya pembinaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pengamanan terhadap hasil kebudayaan Indonesia baik yang materiil maupun yang non materiil menjadi tanggung jawab nasional. Pengamanan tersebut berupa pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang meliputi antara lain pencurian, pengurasan, pengrusakan peninggalan budaya, peniruan dan penyusupan.

Agar hal-hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu diciptakan situasi dan kondisi serta iklim yang baik untuk menumbuhkan daya penghayatan budaya.

Dalam pembangunan hendaknya diperhatikan hubungan timbal balik antara budaya dan pembangunan itu sendiri, antara lain :

- a. Pembangunan hendaknya dijiwai oleh nilai-nilai budaya.
- b. Pembangunan dalam mengembangkan kebudayaan.
- c. Pembangunan kebudayaan merupakan bagian daripada pembangunan nasional.

Dasar pengembangan kebudayaan tersebut adalah dasar yang diletakkan baik di dalam UUD '45 maupun falsafah Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh M.P.R. (Tap MPR No. IV/MPR/1978).

Pelaksanaan kebijakan pengembangan kebudayaan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya, adalah sebagai berikut :

a. Dalam Bidang Pendidikan

Usaha pendidikan merupakan usaha pembudayaan, karena mengandung kegiatan usaha secara sadar untuk membina dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak didik, baik di dalam maupun di luar sekolah yang berlaku dan berlangsung seumur hidup, dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk melaksanakan usaha itu, anak didik harus dibesarkan dalam suatu kehidupan yang mengandung tata nilai budaya bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui jalur dalam sekolah atau pun luar sekolah termasuk lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan rukun tetangga, rukun warga/kampung atau pun wadah organisasi, antara lain dengan penyediaan buku-buku pelajaran bahasa dan ilmu pengetahuan perpustakaan, serta alat-alat peraga mengenai kebudayaan, latihan-latihan di bidang kesenian, karya wisata ke tempat-tempat peninggalan prabakala dan sejarah, museum, pusat-pusat kebudayaan.

Semua kegiatan ini merupakan usaha penghayatan budaya bangsa yang sangat tinggi nilainya bagi anak-anak didik. Dengan demikian anak didik kita memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai unsur kebudayaan bangsa.

b. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Usaha membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dijaga keseimbangan dengan kebudayaan kita yang berlandaskan falsafah Pancasila. Hasil yang diharapkan adalah transformasi positif tentang nilai-nilai integrasi dari kegiatan-kegiatan kebudayaan dengan menerapkan pada kegiatan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya adalah hasil karya budaya. Oleh karena itu meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai sifat netral dan universal, tetapi perkembangannya harus sesuai dengan pandangan hidup atau tata nilai bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Salah satu aspek dari kegiatan ilmu pengetahuan yang utama ialah penelitian. Dewasa ini setiap penelitian terhadap suatu masalah tidak mungkin lagi hanya terpaku pada satu dua disiplin ilmiah, melainkan bersifat multidisipliner, termasuk pendekatan kepada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbagai aspek kebudayaan. Oleh karena itu maka penelitian dengan mempergunakan ilmu-ilmu kemasyarakatan dan kebudayaan perlu ditingkatkan.

c. Bidang Masyarakat.

Kehidupan masyarakat dahulu, sekarang dan waktu yang akan datang tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Masyarakat itu sudah berbudaya dan akan senantiasa berbudaya, karena hanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai kemampuan untuk berbudaya. Tetapi pada dewasa ini banyak bangsa yang karena sejarah masa lalunya seringkali tidak mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk menjalankan kodrat budayanya dan kehilangan identitasnya, maka

bangsa ini kemudian berusaha untuk menemukan 'kepribadiannya sendiri, termasuk Indonesia.

Untuk melaksanakan pola kebijakan kebudayaan dalam masyarakat perlu diperhatikan dua hal utama, yaitu :

1. hubungan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.
2. hubungan dengan proses modernisasi dalam masyarakat.

Semua kegiatan manusia mempunyai hubungan dengan kebudayaan dalam arti bahwa sepanjang masa umat manusia berusaha untuk meningkatkan martabat, atau mutu hidup itu dapat dipandang sebagai usaha modernisasi yang dapat pula ditafsirkan sebagai usaha pembaharuan.

Pembaharuan tidak lain adalah usaha dari bangsa itu sendiri, bagaimana cara mengembangkan kepribadiannya sendiri. Diterapkan pada masyarakat luas, maka modernisasi berarti pembaharuan pada segenap bidang kegiatan manusia dalam masyarakat supaya dapat seirama dengan tuntutan kemajuan jaman yang tetap bertumpu pada tata nilai atau pandangan hidup bangsa kita sendiri sehingga dapat merupakan kontinuitas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Lingkungan sebagai bagian dari tata hidup masyarakat perlu senantiasa dibudayakan. Masyarakat wajib mempunyai kepekaan untuk membudayakan lingkungan hidupnya, terutama mengenai segi-segi kebersihan, ketertiban dan keindahan pada berbagai tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rukun tetangga, rukun kampung/rukun warga, sekolah, kantor, desa, kota sampai wilayah.

d. Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.

Untuk menjamin kelangsungan nilai-nilai budaya Indonesia, perlu penggarapan generasi muda sebagai generasi penerus dan harus melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai

tantangan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.

Dengan demikian :

1. Kepada generasi muda perlu diberikan pendidikan kebudayaan melalui jalur keluarga sekolah, pendidikan luar sekolah dan organisasi-organisasi kepemudaan agar kebudayaan ini menjadi bagian dari kehidupan dan merupakan pandangan hidup.
2. Perlu diciptakan situasi dan kondisi terutama di daerah pedesaan, agar keadaan antara pedesaan dengan perkotaan ditinjau dari sosial ekonomi budaya semakin seimbang.

Pada bidang olah raga yang perlu dibudayakan ialah olahragawan, cabang-cabang olah raga, sarana-sarana dan prasarana, serta peristiwa-peristiwa olah raga :

1. Dalam meningkatkan kesegaran jasmani bangsa dan mempersiapkan olah ragawan untuk mencapai puncak prestasi baik melalui pemasalan (dalam sekolah dan luar sekolah) maupun dalam latihan-latihan khusus, perlu diisi dengan nilai-nilai budaya agar tetap memiliki identitas budaya bangsa Indonesia dan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa.
2. Perlu digali dan disempurnakan cabang-cabang olah raga budaya bangsa Indonesia agar dapat dinikmati oleh seluruh bangsa di samping kita melaksanakan olah raga yang telah dikelompokkan dan dilaksanakan dalam peristiwa-peristiwa internasional.
3. Untuk mendukung olah raga tersebut perlu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. Agar tata pergaulan yang bersifat pertandingan maupun pertemuan olah raga dapat menunjukkan nilai-nilai budaya bangsa.

e. Bidang Media Masa

Media masa seperti pers, radio, televisi dan film merupakan sarana yang sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, karena itu potensi media masa dan peranannya di dalam pembinaan dan pengembang-

an kebudayaan perlu ditingkatkan. Lebih-lebih dalam kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini media masa tidak saja merupakan alat komunikasi yang cepat, akan tetapi juga merupakan alat komunikasi yang luas radius pencapaiannya.

Peranan media masa dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan harus sesuai dan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah. Dalam hal ini media masa merupakan potensi dan sarana dalam penyebarluasan kekayaan warisan budaya, peningkatan dan sumber informasi tentang kebudayaan. Di samping itu media masa hendaknya turut serta menggerakkan dan merangsang kehidupan supaya senantiasa mempunyai fungsi yang hidup dalam masyarakat; memberi pengertian yang benar, kepada masyarakat tentang kebudayaan, terutama kesenian yang mengandung nilai-nilai keindahan; memberi arah yang mantap kepada masyarakat dalam usaha peningkatan perkembangan bakat dan karya seni, memelihara dan memperkenalkan kesenian tradisional, dan menyajikan bentuk-bentuk kesenian baru sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan zaman, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam garis besarnya media masa berperan membantu meningkatkan penghayatan budaya di kalangan masyarakat dengan cara menyajikan acara-acara kesenian seperti film, drama, tari dan lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan, terutama dalam pengembangan sistem komunikasi satelit domestik, peranan media masa perlu diarahkan dan ditingkatkan sejalan dengan kebijakan yang ada. Media masa dalam perkembangannya harus dapat memberikan dan menyajikan acara dan program sesuai dengan aspirasi dan keinginan bagian terbesar masyarakat penerimanya. Di samping itu media masa dapat menampung dan merupakan saluran dari para pembina dan seniman dalam memperkenalkan karya budaya atau pun pikiran, pandangan dan kritik dalam usaha pembinaan pengembangan kebudayaan. Juga media masa harus dapat mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan ke-

kaburan, menurunnya nilai dan pandangan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia.

f. Bidang Hubungan Luar Negeri

Dalam hal ini kerja sama kebudayaan yang telah dilakukan sesuai dengan perkembangan perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan kerjasama kebudayaan harus dapat :

1. menumbuhkan dan meningkatkan saling pengertian, hormat-menghormati dan harga-menghargai antar bangsa.
2. berlangsung dengan baik dan secara timbal balik dapat memperkaya kebudayaan masing-masing dan membantu suksesnya pembangunan nasional.
3. memperkenalkan kebudayaan Indonesia secara lebih luas di luar negeri, dan bilamana perlu di tempat-tempat yang penting didirikan balai-balai budaya Indonesia.

g. Bidang Pariwisata

Hasil karya budaya dapat dimanfaatkan oleh kepariwisataan, tanpa mengganggu pertumbuhan dan pengembangan kebudayaan bangsa kita, bahkan membantu pembinaannya.

Oleh karena itu kegiatan kebudayaan yang berhubungan dengan kepariwisataan hendaknya dapat dibina agar dapat :

1. Membantu mengarahkan pembudayaan dalam hal pemanfaatan waktu yang luang.
2. Menunjang dan memperkuat rasa dan jiwa kesatuan nasional.
3. Meningkatkan hubungan, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai antar bangsa dan tercapainya perdamaian dunia.
4. Mendorong pengembangan obyek-objek kebudayaan dalam rangka usaha menanggulangi eksek kepariwisataan dalam hubungan luar negeri.
5. Meningkatkan usaha penyempurnaan penerangan-pene-

rangan yang benar dan menguntungkan bagi kebudayaan bangsa Indonesia, antara lain dengan mengadakan pengembangan media kebudayaan yang yang luas.

h. Bidang Bahasa.

Kebijakan pemerintah mengenai bahasa dijiwai oleh Sumpah Pemuda 1928. Hal ini dituangkan dalam UUD 45 (Bab XV, pasal 36) dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, dan bahwa bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang dibina oleh masyarakat pemakainya, dihargai dan dipelihara oleh negara sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Kebijakan bahasa di Indonesia merupakan masalah nasional yang meliputi perencanaan, pengarahan dan ketentuan-ketentuan yang mendasari penanganan masalah bahasa secara nasional yang meliputi masalah bahasa nasional, bahasa daerah dan bahasa asing :

1. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budayanya dan bahasanya ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.
2. Bahasa daerah memiliki fungsi dan kedudukan yang amat penting di samping bahasa Indonesia dalam kehidupan serta kontak sehari-hari yang tidak formal, karena itu bahasa daerah perlu dibina terus supaya tidak menghalang-halangi pertumbuhan sehat dari bahasa Indonesia.

Bahasa daerah yang memiliki kesusastraan dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan bahasa Indonesia.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain dan sebagai alat pembangunan serta pendukung kebudayaan daerah.

3. Bahasa-bahasa asing berfungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa; alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa-bahasa asing tertentu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat tertentu dan di dalam kedudukan demikian bahasa-bahasa asing itu tidak bersaing dengan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, serta dengan bahasa daerah, baik sebagai lambang nilai sosial budaya, maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah.

Kebijakan kebudayaan pada bidang bahasa perlu diikuti dengan langkah-langkah usaha pembinaan dan pengembangan yang meliputi:

1. Penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah,
2. Pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah,
3. Pengembangan ketenagaan,
4. Pengembangan sarana,
5. Pengembangan perencanaan dan penilaian.

i. Bidang Kepurbakalaan, Sejarah dan Antropologi Budaya

Hasil penemuan dan penelitian di bidang keurbakalaan, sejarah, dan antropologi budaya, cukup memberikan bukti betapa kayanya bangsa Indonesia akan nilai-nilai luhur warisan budaya tersebut. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bangsa dan negara pada masa kini dan masa datang, maka hasil yang telah dicapai harus berperan sebagai :

1. Cermin dalam memupuk dan mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Memberikan inspirasi, aspirasi dan akselerasi dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
3. Media pendidikan kebudayaan untuk seumur hidup bagi generasi kini dan masa mendatang.
4. Obyek pengembangan ilmu purbakala, sejarah dan antropologi budaya Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.
5. Tempat-tempat wisata budaya baik domestik maupun asing sehingga dapat menimbulkan penghayatan, merasa turut memiliki untuk memelihara dan melindunginya.

Mengingat pentingnya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam peninggalan purbakala, sejarah dan unsur-unsur lainnya dalam antropologi budaya, maka usaha-usaha pemeliharaan, pemugaran, perlindungan, pembinaan dan pengembangan serta penelitiannya perlu ditingkatkan. Hal ini tidak berarti bahwa tanggung jawab dalam usaha tersebut terletak pada pemerintah semata-mata, tetapi juga perlu mengikutsertakan, dan mengarahkan partisipasi positif masyarakat seluruhnya. Mengingat usaha penelitian di bidang kepurbakalaan, sejarah dan antropologi budaya ada kaitannya dengan ahli-ahlinya, yang dewasa ini sangat terbatas jumlahnya, maka kaderisasi untuk mencukupi tenaga-tenaga ahli perlu diusahakan pula secara bertahap. Demikian pula untuk mencapai usaha-usaha penelitian yang sempurna dan dapat mengikuti perkembangan ilmu di bidang-bidang tersebut, perlu adanya perlengkapan dan penyempurnaan sarana-sarana teknis yang modern serta laboratorium, antara lain untuk keperluan dalam ekskavasi, penentuan usia benda purbakala dan sebagainya.

Karena penggalan (ekskavasi), pemeliharaan, pemugaran terhadap kepurbakalaan, sejarah dan benda-benda warisan budaya lainnya, menyangkut masalah teknis, maka dilakukan oleh ahli-ahlinya atau atas petunjuk-petunjuknya. Oleh karena itu perijinan untuk pelaksanaan yang menyangkut

bidang itu termasuk pemindahan hak, lalu lintas benda-benda cagar budaya ada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan atau instansi yang ditunjuknya.

Untuk mencegah kepunahan peninggalan kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai penting dari antropologi budaya perlu pemantapan perlindungan yang dikukuhkan oleh perundang-undangan.

Monumenten Ornantie Stbl. 238 tahun 1931 yang kini masih berlaku, perlu disempurnakan atau diganti sesuai dengan keperluan zamannya. Perlu dibuat perundang-undangan yang menyeluruh yang mencakup semua bidang kebudayaan.

Erat hubungannya dengan keperluan usaha perlindungan, pemeliharaan, penelitian, pembinaan dan pengembangan bidang kepurbakalan, sejarah dan antropologi budaya perlu dilakukan batas (zoning) yang dilakukan oleh perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Usaha pengembangan dan pemanfaatan peninggalan kepurbakalaan, sejarah dan antropologi budaya, agar mencapai sasaran serta tujuannya dalam menimbulkan penghayatan bagi masyarakat, perlu dilakukan melalui segala macam media masa, seperti : radio, televisi, pers/buku-buku petunjuk, film dokumentasi, pameran dan sebagainya.

j. Bidang Permuseuman

Museum merupakan badan yang mempunyai tugas dan kegiatan untuk mengumpulkan, merawat, mencatat, meneliti dan menerbitkan hasil penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Museum mempunyai fungsi sebagai :

1. Pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah,
2. Pusat penyaluran ilmu untuk umum,
3. Pusat penikmatan kesenian,
4. Pusat pengenalan kebudayaan antar daerah dan antar

- bangsa,
5. Obyek Pariwisata,
 6. Media pembinaan pendidikan kesenian dan ilmu pengetahuan,
 7. Suaka alam dan suaka budaya,
 8. Cermin sejarah manusia, alam dan kebudayaan,
 9. Media untuk bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Baik museum umum maupun museum khusus yang mempunyai fungsi sebagaimana disebut di atas, perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Untuk melaksanakan fungsi dan pengembangannya perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut (Pembinaan dan pengembangan museum umum, museum khusus dan museum pendidikan) :

1. Mengadakan penerangan di bidang permuseuman, sehingga masyarakat umum mempunyai penghayatan terhadap permuseuman dan mengerti fungsinya terutama dalam rangka pembangunan bangsa, baik di bidang sosial ekonomi, maupun sosial budaya.

Penerangan di bidang permuseuman tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media masa.

2. Peningkatan registrasi dokumentasi, penerbitan dan perpustakaan. Museum-museum sebagai pusat/tempat penyimpanan benda-benda budaya yang sangat berharga memerlukan sistem pengamanan yang sebaik-baiknya melalui perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

Kecuali itu permuseuman perlu membuat perencanaan untuk segala usaha dan kegiatannya, di samping perlu membuat dan mengadakan penilaian, pelaksanaan dan pengamatan di bidang pemugaran, pemeliharaan baik terhadap koleksi-koleksi maupun terhadap gedung-gedung museum itu sendiri.

Hubungan kerja sama permuseuman di Indonesia dengan permuseuman di luar negeri dan badan-badan internasional yang bergerak di bidang tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan lebih sempurna, sehingga melalui bidang permuseuman tersebut dapat terjalin saling pengertian kebudayaan antar bangsa.

k. Bidang Kesenian

Pola pelaksanaan dalam kesenian mencakup pengertian pembinaan dan pengembangan kesenian Indonesia. Pembinaan meliputi usaha memelihara, menyelamatkan, meneliti, menggali, mengolah, mencatat, memberikan bimbingan dan pengarahan serta peningkatan mutu seni. Pengembangan meliputi penyebarluasan, khususnya usaha yang menuju peningkatan penghayatan seni dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan usaha pembinaan dan pengembangan kesenian ini, materi yang menjadi pokok penggarapan ialah kesenian, seniman, dan masyarakat di mana kesenian dan seniman ada, hidup dan berkembang. Oleh karena itu, antara kesenian, seniman dan masyarakat terdapat hubungan timbal balik dan saling mengisi, yang menguntungkan bagi pembinaan dan pengembangan kesenian bangsa kita khususnya, dan kebudayaan bangsa kita pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka :

1. Kesenian kita, baik yang tradisional maupun kontemporer kita bina, kita tingkatkan mutunya serta kita sebarluaskan untuk dinikmati, diresapi dan dihayati seluruh bangsa Indonesia.
2. Seniman kita, kita tingkatkan daya seleksi, adaptasi dan daya kreasinya, khususnya dalam menciptakan karya seni baru yang bermutu tinggi.
3. Masyarakat bangsa kita, kita tingkatkan daya penghayatannya untuk dapat meresapi dan menghayati nilai-nilai seni bangsa kita sendiri, sehingga berpartisipasi secara aktif, membina, mendukung dan mengembangkan kesenian kita.

Segala usaha pembinaan dan pengembangan kesenian kita, diarahkan kepada tercapainya kehidupan kesenian Indonesia yang berkepribadian, bermutu tinggi, hidup subur, merata, yang mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bangsa Indonesia, serta menunjang pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila.

1. Bidang Pusat Kebudayaan

Proses modernisasi di dalam masyarakat dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat, yang mempengaruhi nilai-nilai hidup masyarakat itu sendiri. Dalam menghadapi kondisi tersebut, dirasa sangat perlu adanya keseimbangan antara faktor sosial ekonomi dengan faktor budaya yang bersifat spiritual dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Faktor spiritual ini dirasa sangat penting dalam usaha mendapatkan ketenangan dan kejernihan jiwa.

Salah satu sarana untuk dapat menciptakan lingkungan suasana budaya dalam masyarakat, ialah adanya Pusat Kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman masyarakat terhadap segala aspek kebudayaan bangsa kita, sehingga membantu proses persatuan, dan kesatuan. Berkumpul dan bertemunya berbagai bentuk kebudayaan daerah yang terungkap sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Kebudayaan, meningkatkan daya inisiatif dan daya kreasi masyarakat, khususnya para budayawan untuk berpartisipasi secara aktif selaku pembina, pendukung dan pengembang kebudayaan bangsa Indonesia yang berkepribadian dan bermutu tinggi.

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka Pusat Kebudayaan merupakan :

1. Tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan kebudayaan, seperti pertunjukan, pameran, pekan seni, seminar, sarasehan, lokakarya, dan pendidikan.
2. Pusat penelitian dan pengolahan seni budaya.
3. Pusat pengumpulan dan penyusunan data kebudayaan, dokumentasi dan pusat penerangan berbagai aspek kebudayaan.
4. Tempat mengadakan rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kebudayaan

Sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan dan pro-

gram-program yang telah ditetapkan, maka apa yang telah dilaksanakan dan dihasilkan di bidang kebudayaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Program Penyelamatan dan Pemeliharaan Warisan Budaya Nasional. Tujuan utama dari usaha ini ialah untuk menyelamatkan warisan sejarah, khususnya peninggalan purbakala di berbagai daerah agar terhindar dari kemusnahan.

Warisan sejarah tersebut meliputi barang-barang seni rupa, benda kesenian, alat perlengkapan rumah tangga dan alat-alat perhiasan.

Untuk dapat memelihara benda-benda warisan sejarah tersebut maka pendidikan tenaga arkeologi mendapat perhatian yang seksama. Di samping itu diusahakan pula agar warisan sejarah tersebut dapat merangsang kembali kegairahan kehidupan kebudayaan daerah yang selanjutnya berkembang ke arah kesadaran budaya nasional.

Perhatian diberikan pula kepada karya seni yang mengungkapkan warisan sejarah yang mengandung nilai perjuangan dan kebanggaan nasional, termasuk perjuangan wanita, sehingga dapat dihayati terutama oleh generasi muda. Penyelamatan dan pemeliharaan warisan budaya nasional dalam Repelita II dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

(1). Inventarisasi Peninggalan Purbakala.

Kegiatan inventarisasi peninggalan purbakala ditujukan untuk mengetahui dan mencek kembali kekayaan bangsa Indonesia yang telah dihasilkan dan menjadi perwujudan identitas bangsa. Untuk kegiatan ini telah ditingkatkan jumlah tenaga pelaksana di bidang kepurbakalaan, antara lain melalui penataran kepurbakalaan sebanyak 305 orang dan, penataran permuseuman sebanyak 162 orang. Dalam pada itu telah berhasil dilakukan inventarisasi kepurbakalaan terhadap peninggalan kepurbakalaan yang pernah dilakukan pada tahun 1914 - 1915, sebanyak 1.116 situs di 26 propinsi dan DKI Jaya.

(2) Penelitian & Penggalian Peninggalan Purbakala.

Tujuan penelitian dan peninggalan purbakala adalah agar dapat mengungkapkan seluk-beluk kehidupan masa lampau nenek moyang bangsa Indonesia secara cermat dan ilmiah serta menyajikannya sebagai sarana pendidikan dan pembinaan kepribadian bangsa. Dari hasil penelitian tersebut akan diketahui kekayaan hasil karya dan kemampuan bangsa di masa lampau baik dalam pembangunan fisik maupun spiritual ekonomi, politik, sosial budaya serta tata pemerintahan.

Selama Repelita II telah diteliti 30 situs kepurbakalaan di luar Jawa. Di samping itu dilakukan pula penelitian kepurbakalaan, antara lain meliputi bidang pra sejarah di Parigi Jampangkulon, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Jaya, Denpasar, Sumbawa, Gilimanuk, Kuburkalang, Wonogiri, Brebes, Surabaya Utara, Kendeng Utara, dan Cijulang, penggalian purbakala di Flores, Gunung Piring (Lombok), Gilimanuk (Bali) dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sangiran, Dakuh, Perengan, Kupang, Gunung Wingko, Matesik, Batang dan Pleret.

Penelitian arkeologi klasik dilakukan di Trowulan (Jawa Timur) Madura, Muara Takus (Riau), Kota Cina (Sumatera Selatan) dan Bali, Gianyar, Buleleng, Bangli.

Penelitian dan penggalian arkeologi Islam telah dilakukan di Sulawesi Selatan, Banten, Aceh, Nusa Tenggara Barat dan Kota Cina di Banten dan terhadap naskah-naskah Islam di Kuningan (Cirebon). Penelitian paleoekologi Radiometri dengan survei pada 5 daerah (Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Gunung Pandan, Sangiran).

Untuk meningkatkan mutu penelitian, telah dilakukan pembangunan laboratorium penelitian purbakala di Jakarta seluas 2028 m² dan dikembangkan kerjasama penelitian purbakala dengan Universitas Indonesia, Gajah Mada, Udayana dan Institut Teknologi Bandung. Di samping itu juga telah dilakukan pengolahan data,

mengadakan dokumentasi hasil penelitian dan sarana peralatannya, termasuk alat mobilitas dan seminar. Mengadakan penerbitan hasil survei dan penelitian serta penggalan dalam bentuk buku.

(3) Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala.

Tujuan pembinaan dan pemeliharaan peninggalan purbakala adalah mempertahankan keutuhan bukti warisan sejarah/kebudayaan bangsa dari kemusnahannya.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembinaan dan pemeliharaan peninggalan purbakala meliputi rehabilitasi dan pemugaran taman purbakala, kraton/puri, pura/mesjid, rumah adat, makam dan gedung bersejarah di berbagai daerah di Indonesia.

Kraton-kraton yang dipugar meliputi antara lain Kraton Kesepuhan dan Kanoman di Cirebon (Jawa Barat), Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta (Jawa Tengah) dan Kraton Kesultanan serta Pakualam di Yogyakarta, Kraton Sumenep (Madura), Istana Sultan Bima, Istana Pagaruyung (Sumatera Barat), Istana Deli di Medan (Sumatera Utara), Balai Kerapatan Istana Siak (Riau) dan Istana Goa (Sulawesi Selatan).

Sejak tahun 1974/75 telah dipugar Mesjid Agung Deli (Medan), Mesjid Raya Azizi Tanjung Pura, Mesjid Agung Cirebon, Mesjid Kuno Mantingan dan Menara Mesjid Kudus.

Pura yang telah dipugar adalah Purá Saraswati, Pura Kahyangan Tiga, Pura Blanjong, Taman Ayun, Pura Kehen, Kareben Langit, Pura Bukit Darma Kutri, Panataran Sasih, Kahyangan Alas Kedaton, Goa Lawah, pura-pura di kabupaten Badung (9 buah pura), pura di kabupaten Tabanan (9 buah), di kabupaten Bangli (4 buah), di kabupaten Buleleng (9 buah), di kabupaten Karangasem (4 buah), di kabupaten Jembrana (6 buah), Besakeh, pura Luhur, Sasana budaya telah dibangun di kabupaten Bangli, Tabanan, Karangasem, Buleleng dan Taman Margarana.

Rehabilitasi dan pemugaran rumah adat dilakukan terhadap rumah adat di Bukit Tinggi dan Tanah Toraja serta Kampung Lingga di Tapanuli.

Makam kuno yang telah dipugar adalah makam Wang Lamuru, Jro Lompo, dan Tallo di Sulawesi Selatan, makam Islam di Gresik dan Leran, serta makam Islam di Gending Suro (Sumatera Selatan), Makam Kyai Maja di Tondano, makam Seloparang di NTB, makam & kraton Pontianak, makam di Lok Seumawe di Perlak.

Taman purbakala yang telah dipugar selama Repelita II adalah Taman Purbakala di Cipare Kuningan, Leles Garut, Pasirangin Bogor, Kotalama Banten, Sunyaragi Cirebon, Punggung Raharjo Lampung, Trowulan, Gunung Aceh, Dieng, Mantingan Jepara, Padang Lawas Sumut, Waruga di Sulut.

Sedangkan gedung bersejarah yang dipugar adalah gedung Linggarjati di Cirebon & gedung Merdeka di Bandung.

(4) Pemugaran Candi Borobudur dan Candi lainnya

Tujuan pemugaran adalah penyelamatan warisan sejarah kebudayaan nasional dari lingkungan untuk kemudian dibina dan dikembangkan serta dimanfaatkan dalam usaha pembangunan bangsa seutuhnya. Mengenai pemugaran Candi Borobudur, diriwayatkan sebagai berikut :

- Pertama kali candi Borobudur dipugar oleh pemerintah Belanda tahun 1907 - 1911.
- Tahun 1959 Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional mulai dengan penelitian secara sistematis.
- General Conference UNESCO (dalam sidangnya pada tahun 1970), memberi kuasa kepada Direktur Jenderal UNESCO untuk mengadakan "Trust Fund" guna pemugaran candi Borobudur.
- Sejak 1969 hingga sekarang candi Borobudur dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pemerintah Republik Indonesia.

- Tahun 1971 "Badan Pemugaran Candi Borobudur" dibentuk oleh Menteri P dan K, yang diketuai oleh Prof.Ir. Rooseno dengan tugas membantu Menteri dalam menangani pemugaran candi Borobudur.
- Untuk menyusun rencana kerja pemugaran candi Borobudur pemerintah Indonesia menerima tawaran pemerintah Belanda berupa tenaga dari NEDECO sebagai konsultan.
- Atas anjuran UNESCO pada Desember 1972 Menteri P dan K membentuk suatu badan internasional "Cunsultative Committee for the Safeguarding of Candi Borobudur" yang diketuai oleh Prof. Ir.R. Rooseno dan beranggotakan 4 orang yaitu D. Chihara (Jepang), J.E.N. Jensen, yang kemudian digantikan oleh Brown Horton III (USA), R. Lemaire (Belgia), K.G. Siegler (Jerman), dengan tujuan membantu Menteri dalam soal-soal teknis.
- Sementara itu UNESCO membentuk "Executive Committee" yaitu suatu badan yang memberi nasehat kepada Direktur Jenderal UNESCO, terutama dalam bidang keuangan UNESCO untuk Pemugaran candi Borobudur.
- 29 Januari 1973, suatu perjanjian ditandatangani oleh pemerintah R.I dan UNESCO yang antara lain menyatakan bahwa :
 1. Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan pekerjaan pemugaran bersifat internasional dengan menggunakan "joint contractor", yang terdiri dari satu kontraktor nasional dan satu kontraktor asing.
 2. UNESCO akan berusaha mengumpulkan dana sejumlah \$ US 5 juta.

Mengenai pelaksanaan pemugaran dilakukan sbb. :

- 10 Agustus 1973 pemugaran candi Borobudur diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
- Pemugaran akan dilakukan 2 tahap, Tahap I, pemu-

garan dimulai awal 1975, yaitu sisi Utara dan Selatan. Pekerjaan ini menurut rencana akan selesai pada Januari 1979.

Sementara itu pekerjaan tahap II, pemugaran sisi Barat dan Timur sudah dapat dimulai yaitu pada tanggal 1 Agustus 1978 dan 18 September 1978.

Pekerjaan pemugaran seluruhnya diharapkan akan selesai pada Oktober 1982.

- Dari 1 Juli 1975 s/d 1 Juli 1977 IBM telah membantu komputerisasi pemugaran candi Borobudur. Kemudian dilanjutkan oleh PUTL. Dan mulai tahap II komputerisasi akan dipindahkan ke Universitas Gajah Mada.

Selain daripada itu kompleks Borobudur dijadikan pusat pendidikan dan latihan pemugaran kepurbakalaan dalam rangka SEAMEC dan ASEAN.

Candi-candi lain yang telah dipugar selama Repelita II adalah candi Cangkuang, candi Brahma di Prambanan, candi Sambisari, candi Banyunibo dan candi Jawi. Pada tahun 1978 pemugaran candi Borobudur diteruskan dengan mempekerjakan tenaga 717 orang terdiri dari berbagai tenaga ahli, yang melaksanakan kegiatan survei arkeologi, pembongkaran, laboratorium, penyediaan peralatan dan fasilitas pemugaran.

Di samping itu dalam tahun 1978/79 akan dipugar pula megalitik di Palu, Benteng di Gorontalo dan Buton, candi Agung di Kalimantan Selatan.

(5). Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Tujuan kegiatan ini untuk menyusun dokumentasi yang lengkap mengenai kebudayaan daerah seluruh Indonesia, yang berupa buku etnografi. Dalam penelitiannya di daerah ditekankan pada 5 aspek kebudayaan yang meliputi sejarah daerah, adat istiadat, folklore, geografi budaya, dan cerita rakyat. Di samping itu juga disusun sejarah kesenian, pencak silat, terjemahan buku etno-

grafi, biografi pahlawan nasional, album alat-alat musik Indonesia dll.

Hasil yang telah dicapai adalah 326 buku/naskah dalam berbagai bidang yang meliputi sejarah daerah (umum) dan tematis sejarah kebangkitan nasional, zaman pendudukan Jepang, revolusi fisik; adat istiadat daerah (umum) dan tematis seperti adat dan upacara perkawinan, sistem gotong royong dan masyarakat desa di Indonesia; geografi budaya daerah (umum) dan tematis seperti : pengaruh migrasi penduduk terhadap perkembangan kebudayaan dan potensi kebudayaan dalam wilayah pembangunan, folklore, seni musik/tari daerah, cerita rakyat daerah, sejarah kesenian Indonesia, permainan rakyat yang mengandung nilai kepahlawanan dan ketangkasan, album alat musik Indonesia, naskah/lontar daerah, etnografi Indonesia yang berbahasa Asing (terjemahan). Untuk memantapkan hasil penelitian tersebut telah dilakukan seminar, lokakarya, simposium, pagelaran dll. Dalam pada itu untuk keperluan penelitian telah ditatar tenaga-tenaga peneliti dari pusat dan daerah sebanyak 126 orang.

(6). Pengumpulan benda purbakala dan benda kebudayaan daerah .

Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan dan perluasan museum di pusat dan daerah sebagai wadah hasil penelitian kebudayaan daerah yang dapat menumbuhkan penghargaan masyarakat luas terhadap sejarah dan karya kebudayaan nasional. Di samping itu peningkatan fungsi museum diperluas sebagai tempat studi, penelitian dan rekreasi.

Dalam pada itu pengembangan museum-museum seperti museum ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dll. juga dilakukan.

Hasil yang telah dicapai dalam Repelita II adalah sebagai berikut : Pembangunan museum di propinsi telah dimulai sejak Pelita I dan diteruskan dalam Pelita II dan menjangkau seluruh propinsi kecuali Timor Timur.

Pada akhir Repelita II telah dapat diselesaikan museum-museum di propinsi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku. Sedangkan di propinsi-propinsi lain dalam penyelesaian secara bertahap.

Di samping itu dalam rangka peningkatan museum dan fungsinya, maka telah dilakukan survai perencanaan & pengadaan koleksi pada 26 propinsi, penambahan koleksi etnografi, historica, — replica — arkeologica dll. pada 23 propinsi.

Mengadakan alat teknis dan administrasi bagi penyelenggaraan museum, serta alat pengangkutan. Meningkatkan fungsionalisasi museum seperti penataan/pengaturan koleksi, dokumentasi-penerbitan, pembinaan tenaga permuseuman dan pengelolaan museum.

Tenaga permuseuman yang telah ditatar selama Repelita II adalah:

83 orang untuk penataran ilmu permuseuman, 117 orang untuk penataran permuseuman tingkat A, 16 orang untuk penataran ilmu permuseuman tingkat B. Jumlah seluruhnya 216 orang.

- (7) Penyebaran pengetahuan tentang kebudayaan warisan sejarah dan kebudayaan daerah.

Tujuan kegiatan ini mengadakan/menyebarluaskan buku hasil penelitian dan penulisan mengenai kebudayaan warisan sejarah dan kebudayaan daerah pada masyarakat luas dan generasi muda, dengan jalan menerbitkan buku.

Hasil yang telah dicapai dalam rangka tujuan di atas adalah : monografi daerah 28.000 ex., cerita rakyat, roman sejarah, album seni, film kebudayaan, rekaman/foto slide dengan jumlah jenis naskah 186 buah. Di samping itu telah diadakan penilaian dan pengolahan terhadap naskah tersebut untuk dijadikan buku bacaan bagi anak sekolah dan masyarakat.

Pada umumnya sebagai hasil dari penelitian dan penulisan dari berbagai bidang merupakan bahan dalam usaha penyebaran pengetahuan tentang kebudayaan tersebut. Hal ini berupa penerbitan buku kepurbakalaan, sejarah & budaya, kesenian dan bahasa serta sastra.

Usaha-usaha penyebaran lainnya melalui mass media RRI dan TVRI, seminar, pagelaran dan misi kebudayaan.

B. Program Pendidikan dan Pengembangan Kesenian

Tujuan program ini adalah mendidik dan membentuk seniman dan pengarang yang memiliki daya cipta dan kreativitas yang tinggi. Kecuali itu juga untuk mempertinggi daya apresiasi kesenian di kalangan masyarakat luas, dengan meningkatkan partisipasi atau memberi peranan penting pada perkumpulan kesenian dalam pembinaan dan pengembangan kesenian.

Tujuan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan seperti :

1. Pengembangan Pusat Pembinaan Pendidikan kesenian.

Dalam usaha melaksanakan kegiatan ini telah dilakukan peningkatan sarana & fasilitas sekolah kesenian, akademi kesenian dan sekolah tinggi kesenian, baik gedung, alat peralatan, penelitian maupun penataran guru kesenian.

Sekolah kesenian tersebut meliputi Sekolah Seni Rupa Indonesia. Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan/Konservatori Tari Indonesia, Akademi Seni Karawitan Indonesia, Akademi Seni Rupa Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Seni Musik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Seni Rupa Indonesia.

Dalam pada itu telah dilakukan inventarisasi dan penelitian tentang buku pelajaran kesenian, metoda pengajaran dan buku bacaan kesenian di sekolah umum dan masyarakat. Menyusun naskah metoda pendidikan kesenian di sekolah umum/kursus dan masyarakat dengan jalan lokakarya, try out dan penyempurnaan metoda

pendidikan kesenian, seperti seni rupa, seni tari dan seni karawitan untuk SMA, seni drama untuk SMP dan SMA. Mengadakan standardisasi persyaratan tenaga guru pendidikan dan kesenian, dan pentrapan metoda pendidikan kesenian lewat TVRI.

Di samping itu juga mengembangkan alat-alat pendidikan kesenian dengan pembuatan proto type, seperti metoda pembuatan seruling diatonis dan pentatonis dari bahan murah.

Dalam pada itu pengadaan peralatan Laboratorium, metoda pendidikan kesenian untuk alat elektronik, alat seni rupa, dan seni tari ditingkatkan.

2. Pengembangan dan Pembentukan Pusat. Kebudayaan di Propinsi

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memelihara dan mengembangkan berbagai bentuk kesenian, baik tradisional maupun kontemporer termasuk kesenian rakyat, sehingga memberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan membina apresiasi masyarakat dalam kehidupan seni.

Melalui kegiatan ini telah dapat dibangun pusat-pusat kebudayaan di seluruh daerah propinsi, kecuali Irian Jaya dan Timor-Timur. Pembangunan pusat kebudayaan di tingkat propinsi dapat dicapai akhir Pelita III. Sementara itu 6 pusat kebudayaan (Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur) telah diresmikan, sedangkan di propinsi lainnya akan diresmikan tahun 1978 seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Utara. Dalam pada itu sesuai dengan kemajuan pembangunannya pusat kebudayaan di propinsi lain akan diresmikan kemudian.

Fungsi pusat kebudayaan adalah sebagai pusat segala kegiatan budaya yang langsung mengolah nilai hidup, khususnya melalui kegiatan kesenian dan kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan seni dan budaya.

Kegiatan Pusat Kebudayaan/Taman Budaya ini adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan kebudayaan antara lain pagelaran, pameran, pekan seni, seminar/sarasehan, lokakarya; menyelenggarakan pengumpulan dokumentasi data kebudayaan, menyediakan serta memberi penerangan berbagai aspek kebudayaan dan menyelenggarakan rekreasi sehat bagi masyarakat.

Sasaran lain yang telah dilakukan melalui kegiatan ini adalah pembangunan/rehabilitasi fisik untuk kantor dan laboratorium seni pada kantor pusat Direktorat Pengembangan Kesenian (Jakarta), pengembangan sistem pembinaan/pengembangan kesenian dengan jalan bimbingan-penyuluhan-peragaan dan penyusunan naskah buku penuntun, pengembangan organisasi kesenian, pengembangan tenaga pembina/pengembang kesenian dengan jalan penataran-ceramah-latihan dan lokakarya, sarasehan, musyawarah pengorganisasian-penyusunan pedoman pengembangan tenaga pembina/pengembang kesenian dengan jalan penataran-ceramah-latihan dan lokakarya. Pengembangan apresiasi seni dengan jalan pagelaran-pameran-latihan-pengiriman duta seni-pekan dan lomba kesenian-lomba seni vokal nasional-pengadaan benda seni untuk pameran; pengamanan kesenian Indonesia dari pengaruh negatif dengan jalan pemantapan organisasi-survai dan pengumpulan data-penelitian penilaian-pengendalian dan penyusunan pedoman. Di samping itu melengkapi peralatan teknis dan angkutan untuk pusat-pusat kebudayaan dan kantor di kabupaten/kodya seluruh daerah propinsi kecuali Tim.Tim. Untuk melaksanakan kegiatan & pengembangan kesenian tersebut telah pula diadakan penataran tenaga kebudayaan, baik tingkat propinsi maupun kabupaten (Kasi Kebudayaan).

3. Melakukan persiapan pendirian Wisma Seni Nasional.

Sasaran kegiatan ini adalah membuat design master plan Wisma Seni Nasional yang akan didirikan di Jakarta. Langkah yang telah dilakukan adalah membentuk panitia nasional yang terdiri dari para seniman, budayawan, arsi-

tek secara perorangan dan kelompok yang mewakili, baik instansi pemerintah (lembaga dan perguruan tinggi) maupun profesi. Panitia nasional ini berfungsi sebagai perencana, penilai dan pengambil keputusan dalam rangka menentukan kegiatan berikutnya.

Melalui dua kali sayembara atau perlombaan mengenai rencana Wisma Seni Nasional, akhirnya dapat dicapai suatu design dan maket terbaik Wisma Seni Nasional yang akan diajukan kepada pemerintah.

Di samping itu telah dilakukan pengumpulan benda-benda seni budaya yang bermutu dan terdiri dari berbagai bentuk dan jenis untuk Wisma Seni Nasional nanti. Dalam pada itu rencana yang lain mengenai ketenagaan, sarana dan pengelolaannya telah disiapkan, demikian pula soal lokasi & tanah untuk Wisma Seni Nasional telah direncanakan. Diharapkan melalui Repelita III pembangunan Wisma Seni Nasional dapat dilaksanakan.

4. Pengembangan Lokakarya Seni

Tujuan kegiatan ini adalah untuk merangsang daya apresiasi serta daya kreativitas dan inovasi untuk pengembangan baik kesenian tradisional maupun sebagai wadah eksperimentasi dalam seleksi dan adaptasi unsur kebudayaan asing. Di samping itu juga untuk memelihara dan mengembangkan kesenian daerah. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data informasi kesenian daerah, menyelenggarakan laboratorium seni dan kesenian, menggali dan mengolah 5 bidang seni pada 25 propinsi, membuat film kesenian dari 5 bidang seni, penulisan/penerbitan naskah bimbingan untuk 4 bidang seni, membuat rekaman musik modern/tradisional, membuat kriteria ketrampilan seni teater tradisional/modern, bimbingan dan pengarahan teknis kesenian pada 26 daerah, seminar notasi karawitan dan tari, saresahan 5 bidang seni. Di samping itu juga mengadakan penulisan seni dalam rangka peningkatan mutu seni, baik peragaan dari daerah seperti seni teater, seni tari, festival musik vokal, maupun dari pusat seperti seni teater, seni tari dan seni musik.

Mengadakan pameran lukisan anak-anak, pameran seni rupa tradisional dan kontemporer, ukiran dan patung, pameran seni rupa Asean di Jakarta.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan kesenian tersebut juga dilakukan pengadaan alat teknis & administratif, serta rehabilitasi gedung kantor Direktorat Pembinaan Kesenian. Demikian pula sarana angkutan perlu dilengkapi.

5. Menciptakan Suatu Sistem Penghargaan.

Tujuan kegiatan ini adalah merangsang adanya penciptaan baru dalam kesenian termasuk karya kesusasteraan dengan memberi hadiah.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah pemberian hadiah seni dan piagam kepada tokoh seniman, kebudayaan, sastrawan dalam berbagai cabang seni. Di samping itu telah diadakan sayembara dan lomba serta pekan seni yang mendapat sambutan dari masyarakat, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dalam bidang kesenian umpamanya telah dilakukan sayembara karya seni : seni musik, seni tari, dengan memberikan hadiah dan piagam. Di samping itu juga memberikan penghargaan dan hadiah kepada seniman yang telah menunjukkan prestasinya yang tinggi. Di samping itu juga memberikan piagam dan hadiah kepada peserta pekan seni/lomba seni, seperti paduan suara untuk kaum ibu dan anak-anak/remaja, pekan seni tradisional, baik yang dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Sementara itu juga memberikan bantuan dana dan bimbingan teknis kepada perkumpulan/organisasi/yayasan kesenian yang berkecimpung dalam pengembangan kesenian.

Dalam bidang bahasa, guna menunjang dan menggairahkan minat terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah diselenggarakan sayembara mengarang bahasa Indonesia secara nasional, yang diikuti oleh guru SD, murid SD, murid SLA dan mahasiswa. Di samping itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa jurusan bahasa & sastra 156

orang. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan bahasa melalui mass media RRI dan TVRI.

Dalam bidang kepurbakalan telah diberikan hadiah/ imbalan jasa terhadap penemu benda-benda purbakala dan para pemilik benda-benda purbakala sebagai ganti rugi atau jasa pemeliharannya.

C. Program Pengembangan Bahasa dan Kesusasteraan

Pembinaan dan pengembangan bahasa dan kesusasteraan Indonesia dan daerah pada dasarnya ditujukan ke arah tercapainya suatu kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sebaik mungkin di kalangan masyarakat luas sebagai sarana komunikasi antar manusia Indonesia.

Dalam usaha membina perkembangan bahasa nasional telah dikembangkan kebijakan pengembangan bahasa yang menyangkut bahasa Indonesia maupun bahasa lain.

Sasaran khusus yang telah dicapai adalah penyusunan buku pedoman dan buku sumber, rangsangan dan penunjangan pengembangan keahlian, serta penyelamatan buku naskah/ berharga.

Selama Repelita II telah diadakan penerbitan buku pedoman dan buku sumber termasuk buku pedoman tentang ejaan dan istilah Indonesia, pembakuan tata bahasa berbagai bahasa daerah sebagaimana juga bahasa Indonesia, penyusunan buku perbendaharaan kata, pengajaran, sosiolinguistik, sejarah bahasa dan dialektologi.

1. Penyusunan buku pedoman dan buku sumber.

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun & menerbitkan buku pedoman/sumber tentang Bahasa Indonesia, seperti pedoman pembentukan istilah, kamus buku, kamus bahasa daerah — Indonesia, kamus filologi, pembakuan tata bahasa, buku pegangan sejarah bahasa dan kesusasteraan Indonesia & daerah, perekaman & pemetaan bahasa daerah, pedoman ujian bahasa Indonesia, kompilasi dan sinopsis tulisan bahasa & sastra.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- a. penelitian perkembangan dan pemakaian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- b. penelitian aspek bahasa Indonesia dan daerah termasuk dialek;
- c. penelitian pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- d. pembakuan bahasa Indonesia dan daerah;
- e. pembinaan sastra Indonesia dan daerah.
- f. penelitian dan penyusunan istilah berbagai ilmu dan bahasa Indonesia;
- g. penelitian dan penyusunan kamus bahasa Indonesia dan daerah.

Dalam pada itu telah diterbitkan pula berbagai kamus daerah Indonesia, seperti kamus Mandar — Indonesia, Kamus Bahasa Jawa Banten Indonesia dan lain-lain. Demikian pula telah diterbitkan Kamus Eka Bahasa Indonesia, Kamus Administrasi, Kamus Biologi, Kamus Geografi, Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial, Kamus Kesenian, Kamus Kimia Organik, Kamus Kimia Umum, Kamus Linguistik, Kamus Pertanian, Kamus Psikologi dan Kamus Sejarah.

Dalam rangka ini telah diterbitkan karya sastra klasik, baik dalam bahasa asalnya, maupun transkripsinya ke dalam bahasa Indonesia, antara lain Centini, Hikayat Putri Gombak Emas (Aceh), Panji Wulung (Jawa Barat), Panji Pakangraras (Bali), Bratayudha dan lain-lain, baik guna meningkatkan pengetahuan murid sekolah maupun mahasiswa dan dunia universitas tentang sastra Indonesia.

Dari 313 judul naskah yang ditargetkan selama Repelita II telah selesai disusun 271 judul naskah yang terdiri dari :

- a. 106 judul naskah bidang bahasa,
- b. 44 naskah bidang sastra,
- c. 65 judul naskah bidang pengajaran, dan
- d. 56 judul naskah bidang istilah.

Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Dalam Repelita II kegiatan diarahkan ke pembinaan dan pengembangan pemakaian bahasa Indonesia, pemeliharaan dan pemanfaatan bahasa daerah untuk kepentingan masyarakat dengan jalan mengadakan :

- a. penataran tenaga-tenaga penyusun kamus (30 orang, di antaranya 5 orang dikirim studi ke luar negeri), peneliti sosiolingustik (30 orang, 5 dikirim studi ke luar negeri), peneliti dialektologi (30 orang, di antaranya 5 orang dikirim studi ke luar negeri), peneliti sastra (30 orang, di antaranya 5 orang dikirim studi ke luar negeri), dan penyuluh bahasa (30 orang).
- b. pemberian beasiswa kepada mahasiswa jurusan bahasa dan sastra (156 orang).
- c. peningkatan kegairahan menulis dengan mengadakan sayembara mengarang dalam bahasa Indonesia untuk siswa SD, SM, mahasiswa serta guru Sekolah Dasar.
- d. penulisan naskah dan penerbitan kamus bahasa Indonesia dan daerah, pedoman pembentukan istilah dan penulisan tatabahasa (jumlah seluruhnya 150.000 ex.).
- e. penyusunan naskah penyuluhan dan apresiasi budaya.
- f. penyusunan rencana induk pengembangan bahasa dan sastra.
- g. peningkatan komunikasi melalui berbagai pertemuan untuk pertukaran pikiran mengenai masalah bahasa dan sastra, antara lain :
 - Seminar politik bahasa nasional
 - Seminar pengembangan Sastra Indonesia dan daerah.
 - Rapat kerja Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia.
 - Sidang Majelis Bahasa Indonesia — Malaysia.
 - Konferensi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
- h. Hubungan kerjasama kebahasaan dengan beberapa negara di lingkungan Asean, Eropa, Amerika dan Australia.
- i. penyuluhan bahasa Indonesia melalui TVRI 200 kali, RRI pusat dan daerah 200 kali, pertemuan berkala dengan wakil media masa 60 kali.

2. Pengadaan sarana perangsang dan penunjang pengembangan keahlian.

Tujuan kegiatan ini adalah pengembangan tenaga ahli di bidang bahasa & sastra Indonesia dan daerah.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah : penataran tenaga penyusun kamus (30 orang), peneliti sosiolinguistik (30 orang), peneliti dialektologi (30 orang), penyuluh bahasa Indonesia (30 orang), peneliti sastra (30 orang); di samping itu diberi kesempatan studi ke luar negeri dari hasil penataran dalam negeri : (5 orang) untuk penyusun kamus, (5 orang) untuk peneliti sosiolinguistik, (5 orang) untuk peneliti dialektologi, (5 orang) untuk peneliti sastra. Selain daripada itu telah diberikan beasiswa pada mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebanyak (156 orang).

Perlu ditambahkan bahwa untuk meningkatkan minat kepada bahasa Indonesia telah dilakukan sayembara menngarang untuk umum, sekolah umum dan guru SD.

3. Penyelamatan buku naskah berharga dan terjemahan karya kesusastraan daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah menyelamatkan buku dan naskah klasik atau yang hampir musnah dengan jalan membeli, pembuatan mikrofilm dan menerbitkan kembali ke dalam bahasa Indonesia.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah membeli beberapa naskah bahasa dan sastra kuno (klasik) dari berbagai pengarang dan judul. Menerbitkan kembali naskah kuno dalam bahasa Indonesia, antara lain cerita Panji Pakangraras, Cerita Panji Galuh Matebuk, Geguritan sebuah bentuk sastra yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Bali, Panji Kuda Semirang, Panji Angraini, Cerita Panji Wulung, telaah sastra daerah novel Minangkabau dll., naskah kitab Babad, naskah Melayu, naskah etnografi, naskah mata uang dari Museum Pusat. Di samping itu telah dibeli beberapa judul buku tentang bahasa dan sastra Indonesia. Buku-buku tersebut telah disimpan dalam perpustakaan bahasa.

D. Program Kegiatan Kebudayaan yang berkaitan dengan luar negeri

1. Mengirim rombongan kesenian ke luar negeri.

Sejak tahun 1968 hingga sekarang telah dilakukan pengiriman rombongan kesenian ke luar negeri, baik dalam rangka pengenalan kebudayaan, mengikuti festival, memenuhi undangan maupun peningkatan apresiasi seni, serta untuk kepariwisataan. Rombongan kesenian tersebut antara lain ke Mexico, Hongkong, Jepang, Teheran (Iran), Kairo, Australia, Kuala Lumpur, Perancis, Jerman Barat, Eropa, Amerika Serikat, Papua New Guinea, dll. Juga Perwakilan-perwakilan RI di luar negeri sering mengadakan pertunjukkan tari-tarian dan pameran barang-barang kerajinan Indonesia. Di samping itu juga Indonesia menerima rombongan kesenian dari luar negeri, antara lain rombongan kesenian dari Australia, Belanda, Singapura, Amerika Serikat, Jerman Barat, Cekoslowakia, Philipina, Perancis, India, Jepang, Italia, Inggris, Thailand, Mesir, dan lain-lain dalam berbagai bentuk kesenian.

2. Mengadakan pameran keliling, seperti pameran benda-benda kuno Indonesia ke Amerika Serikat, pameran patung Budha Amogahidhi ke Jepang, pameran benda-benda candi Borobudur ke Belgia — Belanda — Australia — Swiss — Perancis — pameran fosil ke Jepang, pameran lukisan keliling antar negara yang tergabung dalam Asean. Unesco pernah mengadakan pameran lukisan keliling. Di samping itu Indonesia juga menerima atau menjadi tempat penyelenggaraan pameran negara sahabat seperti, Australia, India, negara yang tergabung dalam Asean dan lain-lain.

3. Workshop, seminar dan sidang-sidang.

- a. Malay Culture, lihat lampiran 1.
- b. Sidang-sidang Asean "P.C. On Socio Cultural Activities", lihat lampiran 1.
- c. Unesco dan lain-lain, lihat lampiran 1.
- d. Pengembalian benda-benda budaya Indonesia dari Negeri Belanda.

Dalam kesempatan ini Indonesia selain menghadiri kegiatan tersebut juga menjadi penyelenggara atau tuan rumah.

4. Penelitian/riset.

Dalam berbagai bidang penelitian, daerah lokasi penelitian dan obyek penelitian serta berbagai kebangsaan peneliti, telah sejak 1970 melakukan penelitian di Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Lebih dari 50 negara telah mengirimkan ahli-ahlinya untuk mengadakan penelitian di Indonesia dalam berbagai bidang studi di beberapa daerah, lihat lampiran 1.

5. Dalam kegiatan kebudayaan yang berhubungan dengan luar negeri, termasuk pula pengiriman tenaga ahli dalam rangka studi dan menambah pengetahuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing, ke berbagai negara. Di samping itu, tamu-tamu luar negeri dengan berbagai kepentingan mengenai kebudayaan Indonesia banyak yang datang.
6. Pengembangan kesenian dalam rangka peningkatan apresiasi seni Indonesia telah dilakukan pula di Negeri Belanda, di Balai Kebudayaan Indonesia untuk daerah Eropa, agar pengetahuan mereka tentang kebudayaan Indonesia bertambah yang memberikan pengaruh saling pengertian dan penghargaan antara satu dengan yang lain. Namun pengembangan yang didukung dengan anggaran pembangunan ini hanya berlangsung satu tahun, yang selanjutnya dilakukan menurut kemampuan anggaran rutin untuk KBRI.
7. Dalam usaha penanggulangan pengaruh negatif dari segala bentuk kebudayaan asing telah dibentuk tim peneliti, yang bertugas untuk meneliti semua kesenian yang akan diperlihatkan/dipentaskan di Indonesia, memberikan ijin dan mengawasi pelaksanaannya. Pada beberapa daerah propinsi juga telah dibentuk dengan maksud yang sama.
8. Pengembalian benda-benda warisan budaya Indonesia :
 - a. Dari Pemerintah Belanda.

Usaha pengembalian benda-benda warisan budaya Indonesia sudah dirintis sejak tahun 1954.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kebudayaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda pada tanggal 1968, telah diperoleh dasar yang lebih kuat bagi usaha pengembalian tersebut.

Pada tahun 1972 Pemerintah Belanda menyerahkan kerapol negara Kertagama karangan Mpu Prapanca tahun 1365 dari zaman kebesaran kerajaan Majapahit, sumber sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia.

Sejak itu Pemerintah Indonesia makin mantap untuk mengajukan keinginannya untuk mengusulkan kembalinya benda-benda warisan budaya yang amat penting bagi sejarah dan budaya bangsa Indonesia kepada Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1974 Menteri Luar Negeri, waktu itu Bapak Adam Malik, mengemukakan permasalahannya kepada Menteri Luar Negeri Belanda Van Den Stock dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri kedua negara tersebut.

Atas saran dari pihak Indonesia, pada tahun 1975 telah dibentuk Tim Ahli oleh masing-masing Pemerintah. Tim Ahli ini bertemu untuk pertamanya dalam bulan Nopember 1975 di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, selain menghasilkan rekomendasi bersama, juga diputuskan pengembalian tahap demi tahap patung Pradnjaparamita, perhiasan kerajaan Lombok, pelana kuda, tombak dan payung Pangeran Diponegoro, manuskrip-manuskrip, arsip-arsip yang dipandang penting bagi sejarah dan budaya Indonesia.

Sejak itu arsip nasional telah menerima microfilm arsip-arsip penting. Dan oleh Arsip Nasional telah dikirim kepada pemerintah Belanda microfilm arsip-arsip yang penting, bagi Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1975 Pemerintah Belanda menyerahkan benda-benda asal Irian Jaya, pada tahun 1976 fosil gajah kerdil dan kura-kura raksasa dari Flores dan Timor dan pada tahun 1977 benda-benda untuk Museum Zoologicum Pogoriesis.

Sebagai tindak lanjut pertemuan I, maka pada tanggal 25 Juni s/d 1 Juli 1977 diadakan pertemuan Tim Ahli ke-2 di Negeri Belanda. Kecuali masalah pengembalian benda-benda warisan budaya dan kearsipan, maka dibicarakan pula tentang training bagi tenaga musea.

Sebagai realisasi dari pertemuan kedua itu telah diserahkan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia benda-benda warisan budaya yang terdiri dari patung Pradnjaparamita, harta pusaka kerajaan Lombok serta pelana kuda, tombak dan payung Pangeran Diponegoro.

Selain dari itu telah pula diperoleh sebagai hadiah dari Yayasan Oranje-Nassau untuk pemerintah Indonesia sebuah lukisan dari Raden Saleh mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro.

Patung Pradnjaparamita dan sebagian dari benda-benda warisan budaya tersebut dipamerkan pada kesempatan hari ulang tahun ke-200 Museum Pusat pada tanggal 24 April 1978.

- b. Pengembalian fosil manusia Mojokerto dari Jerman Barat tahun 1978 (Apa ini boleh dimasukkan?).
- c. Pada tanggal 23 Mei 1975 Tuan Toshizumi Miyauchi dari Jepang telah menyerahkan kepada Konsul Jenderal RI di Kobe sebuah keris antik warisan budaya asal Sumatera dan sebuah tusuk konde, untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
Pada tanggal 11 Juli 1975, benda-benda tersebut diserahkan oleh Kepala Direktorat Hubungan Sosial Budaya Departemen Luar Negeri kepada Kepala Direktorat Museum, Departemen P dan K.

III. PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN SELANJUTNYA

1. Permasalahan Kebudayaan.

Hasil usaha dan kegiatan pembangunan kebudayaan selama Repelita I dan II dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional masih memerlukan peningkatan di semua bidang.

Pembinaan museum-museum umum sebagai pusat pendidikan studi ilmiah, penikmatan seni dan rekreasi sehat, yang merupakan sarana penunjang pengembangan kebudayaan nasional, baru 40% dapat direalisasikan di daerah propinsi dan masih terus memerlukan pembinaan dan peningkatan selanjutnya. Sedangkan museum khusus makin bertambah meskipun pembimbingan dan pembinaan perangsangan terhadap pendirian museum khusus di daerah terus ditingkatkan. Bagi museum nasional persiapan dalam berbagai bidang telah pula dilakukan, sehingga pada waktunya akan direalisasi pembangunannya. Peningkatan fungsi museum dilakukan melalui peningkatan usaha konservasi koleksi, penambahan koleksi pameran koleksi, fungsionalisasi, penataran tenaga permuseuman, sistem pengamanan dan sebagainya.

Pemeliharaan, pembinaan, penelitian, perlindungan warisan sejarah dan purbakala dalam rangka mempertahankan bukti sejarah bagi perkembangan ilmu dan kemanfaatannya bagi pembinaan bangsa belum sampai pada sasaran dan jangkauannya seluruh wilayah. Masih banyak dijumpai taman-taman purbakala, candi-candi, situs-situs kepurbakalaan, makam bersejarah, mesjid, gereja, kraton, puri, pura dan benda-benda bersejarah lainnya yang belum diteliti, dipugar, dibina dan dikembangkan.

Juga terdapat benda-benda bersejarah dan purbakala yang tersebar di seluruh nusantara yang belum diinventarisasikan dan dilindungi sebagaimana mestinya. Sementara itu gejala-gejala

pencurian, penyelundupan dan perdagangan liar benda-benda purbakala masih ada. Karena itu usaha penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan masih perlu ditingkatkan.

Pembinaan obyek-obyek bersejarah yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wisata budaya masih banyak yang harus dilakukan. Kazanah budaya bangsa dalam berbagai bentuk tradisi, adat istiadat, folklore, sejarah, geografi budaya, dapat dicatat dan disusun sesuai dengan metodologi sebagai sumber untuk penelitian selanjutnya, dan sumber-sumber penulisan oleh pengarang-pengarang.

Di samping itu masih banyak naskah-naskah daerah/naskah-naskah kuno yang mengandung nilai-nilai budaya dan kesejarahan belum diinventarisasikan, diteliti, diolah, disusun secara sistematis. Demikian pula penterjemahan naskah-naskah tersebut termasuk lontar-lontar ke dalam bahasa Indonesia dan buku-buku etnografi Indonesia yang berbahasa asing yang masih sesuai dengan pembangunan kebudayaan belum dapat banyak dilakukan. Dalam pada itu usaha pengembangan bagian dokumentasi dan pelayanan informasi sejarah dan budaya, perlu dirintis. Untuk menunjang kegiatan ini diperlukan peningkatan ketenagaan, fasilitas dan sarana yang memadai.

Kegiatan cabang-cabang seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra dan pedalangan telah berkembang meskipun belum meluas dan meningkat mutunya. Untuk itu penunangan terhadap sarana dan fasilitas serta tenaga diutamakan dalam kegiatan selanjutnya.

Penyebarluasan aktivitas seni budaya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai pedesaan. Pembangunan pusat-pusat kebudayaan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah di propinsi, baru dapat direalisasikan 25%. Pengorganisasian dan pengolahan pusat-pusat kebudayaan yang sudah selesai harus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya. Dalam pada itu pewadahan organisasi kesenian, seni-man, pengarang dan kebudayaan sebagai sarana penunjang kehidupan kebudayaan belum dapat perhatian yang serius. Pemerataan dan peningkatan kegiatan pementasan, pameran, pekan seni, lomba seni, pertukaran duta seni masih memerlukan

kan perhatian untuk menghidupkan kegairahan kehidupan Kebudayaan. Dalam pada itu peningkatan apresiasi seni dan pengungkapan seni budaya belum banyak dilakukan. Karena itu dalam tahap selanjutnya usaha ini perlu ditingkatkan, di samping pembinaan tenaga pembina, sarana laboratorium, eksperimentasi dan fasilitas lain yang diperlukan. Kreativitas, ke-trampilan dan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang kebudayaan perlu dibina lebih lanjut.

Perlindungan kehidupan kebudayaan dari pengaruh yang negatif sangat diperlukan berhubung semakin banyaknya pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Di samping itu karya-karya seni budaya bermutu perlu dipelihara dan ditempatkan dalam Wisma Seni Nasional sebagai pusat per-bendaharaan seni budaya Indonesia, yang persiapan pembangunannya telah dilakukan. Sejak ejaan yang disempurnakan diresmikan, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah terus dilakukan melalui penelitian dan pengembangan. Arah dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia maupun daerah telah dapat dirumuskan dalam kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa, peningkatan kegiatan di bidang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi pemerintah, bahasa ilmu pengetahuan dan komunikasi serta pengungkapan seni.

Bagi usaha-usaha pembakuan bahasa telah dilakukan penyusunan buku sumber kamus bahasa Indonesia, kamus istilah, pembakuan tata bahasa dan tata istilah juga pengajaran bahasa dan sastra meskipun masih perlu peningkatan dan pemantapan lebih lanjut. Di samping itu penunjangan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan terus ditingkatkan, baik dalam tenaga ahli, sarana maupun fasilitas. Kegiatan penterjemahan naskah kuno yang bermutu dan penyelamatannya masih memerlukan peningkatan. Juga penerbitan buku-buku bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka menggalakkan minat baca masyarakat terutama generasi muda perlu perhatian khusus.

2. Formulasi pilihan kebijakan

Untuk kelestarian perkembangan kebudayaan Indonesia dan untuk menjamin tercapainya tujuan nasional seperti yang dirumuskan dalam Pancasila, UUD 45, GBHN, maka kebijakan yang telah digariskan ditingkatkan pelaksanaannya.

Di samping menyelesaikan hal-hal yang belum selesai dan meningkatkan kegiatan yang telah dilakukan, perlu pula penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan dengan landasan yang berlaku.

Dengan kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri P dan K dalam Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan.

Tujuan pengembangan kebudayaan dalam arti rangkaian aksi kebudayaan yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis adalah usaha sadar untuk memelihara, menghidupkan, memperkaya, membina dan menyebarluaskan dan memanfaatkan segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pemikiran, kemauan serta perasaan manusia Indonesia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihayati, diresapi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Dengan pengertian tersebut maka tujuan pengembangan kebudayaan secara umum adalah terwujudnya perkembangan cipta, rasa dan karsa manusia Indonesia yang terus menerus, berimbang dan selaras dengan kepribadian Indonesia sehingga merupakan Modal Intelektual Spiritual yang berguna dalam mengembangkan hidupnya dalam batas hakikatnya masing-masing serta bagi usaha memperkuat kepribadian martabat, peradaban, kerukunan ketahanan dan kesatuan nasional dan perdamaian internasional.

Tujuan umum ini disesuaikan pada keharusan menemukan satu bentuk baru peradaban di mana kebudayaan dan pembangunan ekonomi saling menunjang, berhubung kebudayaan berada pada muara pertemuan dua arus besar gagasan yang menandai peradaban dan pemikiran kontemporer, yaitu pemikiran pembangunan di satu pihak dan tuntutan martabat manusia di lain pihak. Dengan perkataan lain, tujuan umum ini

berhubungan erat dengan pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pengembangan kebudayaan.

Mengakui hubungan antara pendidikan dan pengembangan kebudayaan berarti secara implisit mengakui perlunya suatu pendidikan yang terus menerus apabila ia hendak dikaitkan secara fungsional dan efektif bagi pengembangan kebudayaan. Sebab hanya apabila pendidikan dan kebudayaan itu dikaitkan secara erat akan terlihat betapa perlunya pendidikan ditanggapi sebagai satu proses seumur hidup yang terpadu dan bukannya hanya sebagai hasil dari suatu persekolahan formal. Hanya dengan cara ini akan terlihat betapa aspek kebudayaan akan tampil pada setiap tahap kehidupan manusia. Namun penerapan pendidikan yang terus menerus (seumur hidup) pada pengembangan kebudayaan menimbulkan serangkaian masalah teknis yang beraneka ragam dan kompleks seperti pembangunan infrastruktur yang sepadan (pusat-pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun audio visual, museum, perpustakaan, klub sport ataupun pencinta alam dan lain-lain) yang menjadi semakin mendesak dengan semakin meningkatnya urbanisasi; pengadaan pendidik khusus dan pamong kebudayaan (cultural animateur); penggunaan yang bijaksana dari pada peralatan modern informasi massa; perumusan ketentuan, dan peraturan yang berupa program pendidikan orang dewasa dan acara guna mengisi waktu senggang bagi penduduk pedesaan ataupun orang tua ataupun orang cacat.

Sumbangan Museum dan pusat ilmu pengetahuan sangat penting bagi proses modernisasi maupun transformasi bagi kebudayaan ke arah peradaban pada umumnya dan bagi pemupukan suatu kebudayaan ilmiah yang mendasar pada khususnya.

Pamong Kebudayaan diperlukan agar publik yang awam dapat menangkap pesan spiritual yang terkandung oleh sesuatu benda kebudayaan. Karya kesenian yang kita rawat dan yang kita ingin wariskan kepada generasi penerus bukan sekedar benda yang harus dikagumi ataupun dianggap keramat. Nilai maupun artinya terletak pada gema yang dipantulkan pada orang yang memperlihatkannya.

Karya tersebut harus dapat bertindak sebagai penggugah, sebagai penghibur, sebagai pengingat, sebagai faktor referensi. Maka itu diperlukan adanya suatu perantara, yang dalam hal ini disebut : "Pamong Kebudayaan" yang tugasnya berupa animasi yang sekaligus berarti pengenalan dan pengertian, bukan sekedar berupa suatu penyajian baru dari pada karya kesenian. Jangkauannya meliputi penampilan bidang kebudayaan sebagai keseluruhan. Animasi bukan sekedar pendidikan kebudayaan, tetapi jauh lebih luas dari pada itu.

Ia berusaha menyalakan api perhatian, memberikan pandangan tetapi tidak mendesakkan suatu kehendak. Ia harus dapat memberikan alasan-alasan perasaan apabila pikiran tidak dapat menjelaskannya kepada orang-orang yang berada pada tingkat pengetahuan yang berbeda tetapi sama di dalam emosi, terhadap keindahan, sama di dalam mencari kekayaan spirituil, sama di dalam keinginan menikmati kekayaan kebudayaan.

Sejauh mengenai tujuan yang khusus dari usaha pengembangan kebudayaan nasional, ia berhubungan dengan kebutuhan yang mendesak dari pada masyarakat kita yang sedang berada dalam proses transformasi baik di bidang kebudayaan maupun di bidang ekonomi.

Transformasi yang terjadi melalui usaha pembangunan ekonomi ini menunjukkan lima kelemahan pokok yang bila tidak ditanggulangi dapat menjadi bencana, jika dilihat dari sudut kebudayaan. Kelemahan ini berupa ketidak sanggupan proses transformasi itu untuk menguasai hubungan antara kerja dan kesenggangan (leisure), perkembangan kota, penggunaan peralatan audio visual, pemerataan penikmatan hasil pembangunan dan partisipasi.

Waktu tersisa yang tidak banyak biasanya diisi dengan hiburan ringan yang sama sekali tidak membantu perkembangan nilai-nilai budaya di dalam diri orang yang bersangkutan, karena acapkali hiburan itu berupa dua jenis pelarian. Pertama secara pasif duduk di muka TV atau mendengarkan radio, yang menampilkan tontonan ataupun hiburan musik yang setiap kali kurang bermutu dipandang dari sudut kebudayaan. Atau secara aktif melakukan aktivitas erotik yang hanya memuaskan naluri

lementer yang tidak banyak berbeda dengan naluri makhluk hewan.

Berhubung dengan semua ini kebudayaan terpenggil untuk memanusiawikan mekanisme dan lingkungan kerja di satu pihak dan membudayakan kesenggangan di lain pihak. Integrasi kebudayaan ke dalam kerja dan kesenggangan memang memerlukan biaya, tetapi ia terang bukan satu aksi yang mewah, sebab nilai-nilai kebudayaan inilah yang membedakan antara manusia dari hewan, sedangkan kebudayaan merupakan data yang permanen dari kehidupan manusia dan di setiap tahap aktivitas manusia.

Sesudah kerja dan kesenggangan, sesuatu aksi kebudayaan diperlukan untuk memanusiawikan kehidupan kota, terutama kehidupan di kota-kota besar. Urbanisasi tanpa urbanisasi seperti yang telah terjadi dewasa ini, tidak hanya menurunkan mutu kebudayaan daripada kehidupan penduduk kota, tetapi juga mengasingkan manusia dari alam lingkungannya.

Guna mencegah akibat yang merugikan perkembangan manusia ini kota-kota perlu dijadikan forum kebudayaan, forum pertemuan, dan komunikasi seni dan sastra, forum ilham dan penciptaan.

Dengan perkataan lain, mengatur perkembangan kota seharusnya merupakan bagian dari sesuatu aksi kebudayaan dan tidak hanya bagian dari aksi teknik atau aksi administratif.

Peralatan audio visual kini sudah menyebar di seluruh pelosok Tanah-Air. Mulanya orang menaruh harapan yang besar terhadap kemajuan teknik komunikasi ini bagi penyebaran nilai-nilai kebudayaan. Dalam kenyataannya, harapan ini tidak selalu terpenuhi. Acara yang disajikan tidak selalu berupa penyebaran nilai-nilai kebudayaan, tetapi acapkali berupa tontonan dan hiburan yang secara esensial berupa konsumsi kebudayaan yang kurang membekas. Aksi kebudayaan dalam hal ini lalu berupa usaha bagaimana dengan penyebaran peralatan audio visual ini dapat membuat setiap rumah tangga menjadi satu pusat kesenian, di mana seluruh anggota keluarga tanpa pergi dari tempat kediamannya dapat menikmati penyajian musik ataupun tari-tarian yang pada waktu bersamaan diperagakan di tempat lain yang jauh terpisah. Di pihak lain, dengan menye-

barnya radio, kaset, bahkan televisi sampai ke pedesaan yang terpencil telah berhasil menyebarluaskan penggunaan bahasa nasional yang menjurus kepada persatuan, meluaskan cakrawala pandangan dan pengetahuan penduduk yang terpencil sekaiipun mengambil pilihan-pilihan yang tepat, membangkitkan "sense of priority" di dalam tindakannya sehari-hari. Mengenai fungsi dan bentuk pelaksanaan pengembangan kebudayaan, adalah seperti berikut :

Fungsi pengembangan kebudayaan nasional adalah :

- a. menghidupkan kebudayaan nasional;
- b. memelihara kehidupan nasional;
- c. memperkaya kebudayaan nasional;
- d. membina ketahanan kebudayaan nasional;
- e. menyebarluaskan dan memanfaatkan kebudayaan nasional;

Berdasarkan fungsi tersebut di atas maka pelaksanaan pengembangan kebudayaan nasional pada pokoknya berbentuk seperti berikut:

a. Memelihara Kebudayaan Nasional

1. Mengelola, menggali dan memperbaiki hasil karya kebudayaan tradisional yang tersebar di seluruh Tanah Air.
2. Meneliti, mendokumentasikan dan memasyarakatkan perbendaharaan kebudayaan nasional.
3. Mengadakan perlindungan cagar budaya.

b. Menghidupkan Kebudayaan Nasional

1. Membangun sarana, lembaga dan pusat-pusat penelitian, pengkajian, penyajian dan pendidikan kebudayaan.
2. Membangkitkan dan mengembangkan perbendaharaan kebudayaan tradisional.
3. Menghasilkan tenaga terdidik, melalui jalur formil maupun non formil, yang akan mempunyai profesi di bidang kebudayaan sebagai antara lain seniman pelaku, seniman pencipta, dan pamong pengembangan kebudayaan nasional.
4. Mendorong pendidikan kebudayaan melalui jalur non for-

mil yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan kebudayaan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

c. Memperkaya Kebudayaan Nasional

1. Mengolah bentuk, corak, langgam dan atau semangat kebudayaan tradisional untuk diselaraskan dengan tingkat perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan manusiawi di masa depan.
2. Membina bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah.
3. Membangkitkan dan memupuk terus menerus sumber-sumber penciptaan melalui pengenalan gagasan-gagasan dan karya-karya baru.
4. Mendorong penciptaan kontemporer daripada karya kesenian dan karya akal budi.
5. Menyediakan bantuan dan atau peralatan oleh pemerintah bagi usaha non pemerintah di bidang pengembangan kebudayaan dalam batas kesanggupan keuangan negara dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

d. Membina Ketahanan Kebudayaan Nasional

1. Mengamati dan meneliti semua unsur dan kegiatan kebudayaan asing, yang dapat merugikan tata nilai kehidupan dan perkembangan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam hal daya penangkapan, pemilihan, penyerapan dan penyesuaian unsur-unsur kebudayaan asing terhadap perkembangan peradaban bangsa sehingga ia merupakan pengolah budaya yang fungsional.
3. Mengatur, mengamati dan mengarahkan penggunaan sarana dan lembaga kebudayaan.
4. Menggiatkan penulisan sejarah nasional serta pendidikan dan pengembangan kesadaran sejarah yang meliputi baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan.
5. Menggiatkan pengenalan dan perlindungan tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan nasional.

e. Menyebarluaskan dan Memanfaatkan Kebudayaan Nasional

1. Memperluas kemungkinan dan kemampuan anggota masyarakat untuk turut menghayati, menikmati, membina, memperkaya, memiliki dan menyebarluaskan hasil karya kebudayaan nasional.
2. Memperluas pandangan hidup, perhatian dan ketrampilan anggota masyarakat bagi kepentingan perkembangan peradaban.
3. Membudayakan hubungan antara kerja dan kesenggangan, perkembangan pusat-pusat pemukiman dan penggunaan peralatan audio visul serta media komunikasi lainnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL

Untuk selanjutnya sesuai dengan kebijakan yang diambil, maka perlu ditingkatkan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui tahap pembangunan dalam Repelita III.

Kegiatan yang akan dilakukan selama Pelita III merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis selama Pelita I dan II dengan pemantapan dalam bidang konsepsi dan pola pengelolaan operasional. Hal ini berarti bahwa harus terdapat usaha untuk mengkoordinasikan kebijakan mengenai pengembangan kebudayaan baik antar departemen maupun antar sektor dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini akan diwadahi dalam Program Pengembangan Kebudayaan Umum. Di samping itu sebagai kelanjutan dari usaha selama Pelita yang lalu, kegiatan pengembangan kebudayaan nasional akan ditampung dalam empat program yakni (1) Program Kepurbakalaan, Kesenjarahan, Permuseuman dan Pusat Pengembangan Pengetahuan; (2) Program Kesenian; (3) Program Kebahasaan dan Kesusastraan dan (4) Program Perbukuan dan Perpustakaan.

1. Program Pengembangan Kebudayaan Umum

Pengembangan kebudayaan nasional mencakup segenap aspek perikehidupan bangsa dan negara Indonesia. Secara operasional maka terdapat berbagai departemen yang secara langsung menangani kegiatan kebudayaan nasional. Untuk pengembangan kebudayaan yang sistematis dan terarah diperlukan adanya kebijakan secara nasional yang berfungsi sebagai mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan.

Untuk itu maka penyusunan berbagai kebijakan nasional yang mencakup berbagai departemen merupakan suatu keharusan. Hal ini antara lain mencakup bidang-bidang media komunikasi massa, perfilman, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, kepen-

dudukan, narkotika, kesehatan, penerbitan dan kegrafikaan.

Dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri akan dilakukan pemantapan kegiatan yang berupa pola pembinaan yang lebih terarah dalam bentuk berbagai kebijakan, baik yang mencakup kebijakan konsepsional maupun kebijakan operasional. Usaha ini akan mencakup antara lain permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, pusat pengembangan pengetahuan, kesenian, kebahasaan, kesastraan, perbukuan dan perpustakaan. Di samping itu sesuai dengan pengarahannya Garis-Garis Besar Haluan Negara akan dilakukan kegiatan dalam usaha untuk meniadakan nilai-nilai budaya tradisional yang tidak mendukung pembangunan nasional dan pembinaan bangsa serta mencegah pengaruh kebudayaan asing yang negatif dan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai luar yang positif yang diperlukan bagi pembaharuan dalam pembangunan.

Secara lebih terperinci maka kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menyusun koordinasi kebijakan antar departemen dalam pengembangan kebudayaan nasional secara konsepsional;
- (2) Menyusun kebijakan tiap sektor kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik yang mencakup pola pembinaan konsepsional maupun operasional;
- (3) Melakukan usaha untuk meniadakan nilai budaya tradisional yang tidak mendukung pembangunan nasional dan pembinaan bangsa serta mengembangkan nilai budaya tradisional yang mendukung hal-hal tersebut;
- (4) Melakukan usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai yang positif yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan;
- (5) Melakukan usaha untuk menyebarluaskan pengertian mengenai pengembangan kebudayaan dan hubungannya dengan pembangunan nasional dengan penyediaan berbagai publikasi;
- (6) Menyediakan berbagai publikasi dalam bidang kebudayaan dalam rangka menggalang kesatuan, persatuan dan ketahanan nasional;

- (7) Mengadakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kebudayaan di pusat dan daerah;
- (8) Melakukan usaha pemantapan sistem pembinaan dalam pengembangan kebudayaan yang mencakup prasarana, sarana dan ketenagaan; dan
- (9) Melakukan usaha pembinaan teknis dan pengembangan kebudayaan.

2. Program Kepurbakalaan, Kesejarahan, Permuseuman dan Pusat Pengembangan Pengetahuan

Pembangunan pada hakekatnya adalah berorientasi ke depan yakni merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai di hari depan. Walaupun begitu suatu bangsa harus juga menarik manfaat dan pengalaman dari sejarah masa silam agar tidak kehilangan tujuan dalam berkehidupan. Sejarah merupakan cermin masa lalu yang bersifat kependidikan bagi pembinaan bangsa.

Penulisan sejarah yang dijumpai sekarang ini lebih menonjolkan fakta dan peristiwa dibandingkan dengan menonjolkan suatu proses atau idea yang timbul dalam suatu fase sejarah. Dengan demikian maka pelajaran sejarah tidaklah bersifat mendidik dalam pengertian yang dimaksudkan di atas, yakni pengemukakan proses atau gagasan. Pelajaran sejarah seyogyanya harus bersifat mendidik dalam ruang lingkup yang kita sebutkan. Oleh sebab itu maka buku pelajaran sejarah sebaiknya ditinjau kembali. Di samping buku-buku pelajaran juga sebaiknya diterbitkan produk yang bersifat mengemukakan kejadian historis dengan penyajian secara populer. Dalam hubungan ini maka bidang arkeologi, terutama dalam kegiatan penyelamatan dan pemeliharaan warisan budaya nasional, pembinaannya haruslah dikaitkan dengan fungsi pendidikan ini. Prioritas haruslah diberikan kepada obyek yang mempunyai nilai kependidikan yang tinggi.

Warisan budaya harus terus dijaga sebagai salah satu sarana pembinaan bangsa bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Penyelamatan warisan budaya ini diselenggarakan melalui usaha-usaha penelitian, penggalian, pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, penghayatan, pendokumentasian dan penerbitan dari

warisan budaya nasional maupun daerah. Ruang lingkupnya mencakup bidang sejarah, antropologi budaya, arkeologi dan peninggalan sejarah/purbakala. Untuk melaksanakan hal ini dengan baik maka diperlukan peningkatan dan penyempurnaan ketenagaan dan sarana yang diperlukan.

Dalam pada itu pemeliharaan/konservasi peninggalan sejarah/purbakala dengan cara tekno-arkeologis harus dirintis melalui penyelenggaraan laboratorium. Demikian pula peraturan/perundang-undangan mengenai cagar budaya perlu disempurnakan. Kerjasama dengan pihak luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan nasional.

Museum dan pusat pengembangan pengetahuan yang bersifat peragaan media audio-visual merupakan sarana kependidikan yang penting baik ditinjau dari segi pendidikan perorangan maupun dari segi pembinaan bangsa. Kebijakan mengenai hal ini akan segera disusun yang mencakup museum nasional, sejarah, perjuangan, seni, adat istiadat dan pusat pengembangan pengetahuan. Dengan adanya kebijakan ini maka arah pembinaannya menjadi jelas sehingga museum dan pusat pengembangan pengetahuan dapat berfungsi sebagai sarana kependidikan yang efektif dan bukan sekedar obyek peragaan yang statis. Di samping fungsi peragaan ini juga dilakukan kegiatan pengumpulan, perawatan, pencatatan, penelitian dan publikasi. Dalam hubungan ini maka pendidikan arkeologi yang kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat akan lebih digairahkan.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Melakukan penelitian sejarah dan budaya, penelitian dan penggalian (ekskavasi) peninggalan sejarah dan purbakala;
- (2) Mengadakan inventarisasi dan dokumentasi peninggalan warisan sejarah, budaya dan purbakala;
- (3) Mengadakan bimbingan, pengendalian, evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kebudayaan;
- (4) Melakukan penerbitan dan penyebarluasan hasil penelitian/penggalian sejarah, budaya dan purbakala;
- (5) Melakukan pemugaran, pemeliharaan dan penyelamatan pe-

ninggalan sejarah, budaya dan purbakala;

- (6) Menyelamatkan naskah dan buku tradisional dalam bahasa Indonesia dan daerah yan bernilai sejarah dan budaya;
- (7) Meningkatkan kegiatan pelestarian lingkungan sosial budaya;
- (8) Meningkatkan dan mengembangkan museum nasional, museum umum dan museum khusus;
- (9) Mengembangkan pusat-pusat pengembangan pengetahuan yang bersifat peragaan dalam media audio-visual;
- (10) Melakukan pembinaan dan pengembangan sejarah, budaya, purbakala dan peninggalan nasional;
- (11) Mengadakan pameran, ceramah, lokakarya, seminar dan pelbagai bentuk sayembara tentang warisan budaya nasional melalui media komunikasi;
- (12) Membuat reproduksi karya-karya kesenian yang bermutu;
- (13) Mengadakan dan menyebarluaskan informasi tentang warisan budaya nasional, melalui pelbagai media komunikasi;
- (14) Menyempurnakan mutu buku pelajaran sejarah kebudayaan dan menyediakan naskah bacaan yang berlatar belakang sejarah dan kebudayaan;
- (15) Menterjemahkan dan menerbitkan buku-buku mengenai kebudayaan tradisional ke dalam bahasa Indonesia;
- (16) Meningkatkan sarana, fasilitas dan mobilitas;
- (17) Meningkatkan kemampuan tenaga peneliti, teknisi, administrasi dan pamong-pamong kebudayaan di bidang kepurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan;
- (18) Menyelesaikan pemugaran Candi Borobudur dan merintis pemugaran kompleks Candi Prambanan.

3. Program Kesenian

Pembinaan dan pengembangan kesenian meliputi usaha penggalan, pengolahan, penyajian dan penyebaran hasil seni dengan memperhatikan keadaan masyarakat yang sedang berkembang.

Di samping itu dilakukan pengamanan dan perlindungan ter-

hadap kesenian nasional terhadap ekspansi seni dari luar untuk mempertahankan identitas kesenian nasional yang luhur.

Kesenian merupakan produk kebudayaan yang meninggikan nilai etik dan estetik dari masyarakat. Nilai-nilai ini perlu dikembangkan dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, agar tercapai keseimbangan antara nilai material sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan nilai spiritual. Nilai spiritual yang berorientasi kepada rasa estetik akan menahan eksekse ke arah pemujaan materi yang berlebihan. Oleh sebab itu maka kegiatan kesenian merupakan sarana pembinaan bangsa yang efektif dalam rangka pembinaan sistem nilai yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pembinaan kesenian yang mantap. Dewasa ini masih terdapat produk kesenian yang berorientasi terhadap nilai-nilai yang bersifat negatif umpamanya sex, kekerasan dan hidup mewah. Di pihak lain produk kesenian yang bersifat mendidik ke arah pembentukan nilai-nilai yang positif dan konstruktif seperti rajin, jujur dan kerja keras adalah masih kurang sekali.

Adanya kebijakan yang jelas dalam menanggapi hal ini akan mengarahkan kegiatan kesenian sebagai sarana pembinaan bangsa yang efektif dalam pembangunan nasional.

Apresiasi seni yang baik dari masyarakat membutuhkan usaha pendidikan dan penyuluhan yang sungguh-sungguh. Di samping itu hasil kesenian yang bersifat ekspresif harus dikembangkan.

Generasi muda biasanya membutuhkan saluran untuk mengekspresikan dirinya dan kesenian merupakan saluran yang positif untuk memenuhi kebutuhan ini. Pusat Kebudayaan merupakan sarana bagi kegiatan penyaluran ini di samping menampung aspirasi-aspirasi budaya lainnya dari masyarakat.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Membangun Wisma Seni Nasional di Jakarta dan Taman Budaya di Propinsi dan Kabupaten sebagai sarana pembinaan kebudayaan yang berfungsi sebagai tempat: pagelaran, dis-

kusi, pameran, penataran, pendidikan, laboratorium seni dan kegiatan lainnya yang menampung aspirasi budaya masyarakat;

- (2) Merangsang kegairahan berkarya seni dengan jalan mengadakan sayembara dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi tinggi;
- (3) Memupuk, meningkatkan dan mengembangkan disiplin Nasional di kalangan masyarakat seni;
- (4) Membangkitkan serta meningkatkan apresiasi seni masyarakat terutama generasi muda dengan jalan menyebarluaskan karya seni kepada masyarakat luas, penyuluhan, pameran, peragaan, pagelaran, diskusi dan berbagai kegiatan pendidikan kesenian lainnya secara merata;
- (5) Mengadakan penelitian, penggalian, pengolahan dan dokumentasi kesenian tradisional;
- (6) Memelihara, membina dan mengembangkan kesenian yang bernilai luhur;
- (7) Memperluas pandangan dan wawasan seni dengan jalan mengadakan pekan/lomba seni, pertukaran duta seni baik antar daerah, regional maupun internasional dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- (8) Membina dan mengembangkan kesenian daerah;
- (9) Meningkatkan daya cipta dan kreativitas seniman dengan jalan pemberian ceramah, sarasehan, lokakarya dan penataran;
- (10) Meningkatkan daya cipta dan inovasi organisasi kesenian dan senimannya dengan jalan bimbingan pemberian bantuan;
- (11) Mengadakan pengamatan, penelitian dan menentukan terhadap aktivitas kesenian dalam dan luar negeri;
- (12) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi pengaruh kebudayaan yang negatif;
- (13) Menyediakan tenaga dan pamong kebudayaan di bidang kesenian serta sarana penunjang bagi terlaksananya semua kegiatan kesenian;
- (14) Mengadakan penelitian dan penyusunan bahan-bahan pendi-

dikan dan pengembangan kesenian di pendidikan formal dan non-formal.

4. Program Kebahasaan dan Kesastraan

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang penggunaannya harus terus ditingkatkan dan materi bahasanya harus terus disempurnakan. Pembinaan dan pengembangan bahasa nasional meliputi usaha-usaha seperti penelitian bahasa dan sastra Indonesia, daerah dan asing; pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; pembinaan komunikasi dan penyuluhan kebahasaan.

Penggunaan bahasa Indonesia secara benar, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan sesuatu yang harus dibina secara terus menerus.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai bidang seperti dalam administrasi pemerintahan perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

Secara berangsur-angsur bahasa Indonesia bukan saja harus merupakan bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar namun juga merupakan alat komunikasi lisan dalam masyarakat pendidikan. Atau dengan perkataan lain, bahasa Indonesia harus dipergunakan oleh murid dan guru selama mereka berada dalam lingkungan sekolah. Demikian juga hal ini berlaku untuk lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Penggunaan bahasa Indonesia secara intensif dan luas bukan saja akan mempertebal rasa kebanggaan kita namun akan mempercepat pertumbuhan bahasa itu sendiri. Dalam hal ini maka bahasa daerah terus dibina tanpa merugikan perkembangan bahasa Indonesia.

Secara material bahasa Indonesia harus terus disempurnakan agar dapat berfungsi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Bahasa bukan saja alat komunikasi pemikiran yang harus jelas dan reproduktif namun juga sebagai alat pengemukaan ekspresi yang kreatif. Pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ilmiah harus diimbangi oleh pembinaan bahasa sebagai alat ekspresi estetik. Dalam hal ini maka kesusasteraan sebagai hasil seni yang mempergunakan media bahasa merupakan pencerminan dari kemajuan bahasa itu sendiri. Kegiatan sastra harus

terus dibina dan dibantu perkembangannya karena hasil seni seperti ini biasanya tidak bersifat komersil. Apresiasi masyarakat terutama generasi muda terhadap hasil sastra yang bernilai tinggi harus terus dibina.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dilakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- (1) Meneliti bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka usaha mengembangkan kebijakan kebahasaan dan kesastraan, serta pengembangan materi bahasa dan sastra;
- (2) Membina dan mengembangkan bahasa daerah dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana identitas nasional dengan semangat Bhineka Tunggal Ika;
- (3) Mengembangkan bahan hasil penelitian/penulisan kebahasaan dan kesastraan untuk lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat luas;
- (4) Mengadakan bimbingan, pengendalian, evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kebahasaan dan kesastraan;
- (5) Mengadakan pembinaan/pengembangan dan pembakuan prasarana, sarana fasilitas dan tenaga kebahasaan dan kesastraan;
- (6) Mengadakan penterjemahan karya-karya kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang pengembangan bahasa nasional, ilmu dan teknologi;
- (7) Menyempurnakan materi bahasa Indonesia dengan jalan penyusunan buku pedoman, buku sumber, pembakuan tata bahasa, tata istilah dan penyusunan kamus;
- (8) Menyempurnakan materi bahasa Indonesia dengan jalan penelitian, pertemuan ahli bahasa dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya;
- (9) Memberikan informasi kebahasaan dan kesastraan dan penyuluhan tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat luas maupun instansi pemerintah maupun swasta lewat lembaga-lembaga pendidikan, media komunikasi massa maupun penerbitan berkala;

- (10) Menggunakan dan memanfaatkan media massa : pers, film, RRI, TVRI, dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra;
- (11) Merangsang kegiatan sastra yang bermutu dengan jalan sa-yembara, meningkatkan apresiasi sastra lewat berbagai ke-giatan dan memberi bantuan terhadap kegiatan sastra; dan
- (12) Menyediakan prasarana, sarana, fasilitas, dan tenaga bagi terlaksananya semua kegiatan bahasa dan sastra.

5. Program Perbukuan dan Perpustakaan

Buku merupakan sarana komunikasi yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan, referensi dan rekreasi. Perpustakaan merupakan tempat informasi di mana buku dan berbagai jenis publi-kasi lainnya tersedia dalam melayani kebutuhan berbagai kebu-tuhan informasi tersebut. Dalam transformasi dari kebudayaan ke peradaban maka peranan buku dan perpustakaan menjadi kian menonjol di mana komunikasi ditekankan kepada bahasa tulisan yang eksplisit dan tercatat. Buku dan perpustakaan bukan saja merupakan sarana kependidikan bagi manusia perorangan namun juga sebagai sarana kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Untuk itu maka kebijakan tentang perbukuan dan per-pustakaan harus dikembangkan di samping peningkatan minat baca masyarakat. Secara sistimatis dan terarah akan dilakukan usaha untuk menyediakan berbagai buku yang bersifat fungsional, baik bagi pengembangan pribadi perorangan dan pengembangan aktivitas produktif masyarakat, maupun pembinaan bangsa secara menyeluruh dalam lingkup kebudayaan nasional. Naskah yang baik dan bersifat langka akan disusun dan diberikan kepada per-cetakan swasta dengan jaminan pasar.

Di samping itu akan diciptakan iklim yang merangsang kegiatan penerbitan dengan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan, penataran dan pemberian hadiah bagi mereka yang ber-prestasi menonjol.

Pengembangan perpustakaan mencakup perpustakaan na-sional, perpustakaan wilayah, perpustakaan umum, perpustakaan keliling dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang diselenggarakan pada tingkat nasional yang

berfungsi sebagai perpustakaan deposit, perpustakaan induk, pusat bibliografi, koordinator kerjasama antar perpustakaan lainnya. Perpustakaan wilayah adalah perpustakaan yang berfungsi seperti perpustakaan nasional pada tingkat propinsi. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat baik di sektor perkotaan maupun pedesaan. Perpustakaan keliling, sebagai salah satu bentuk perpustakaan umum, adalah perpustakaan yang melayani konsumen yang terbatas yakni perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah berfungsi melayani guru, murid dan petugas sekolah yang lainnya dalam menunjang kegiatan kurikuler.

Tujuan pokok dari usaha pengembangan perpustakaan dalam Pelita III adalah melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Pelita II yang mencakup pelayanan perpustakaan dalam rangka merangsang kegiatan membaca di kalangan masyarakat luas dan mendorong perkembangan perpustakaan masuk ke desa. Diharapkan lewat peningkatan kegiatan membaca ini maka pengetahuan dan ketrampilan anggota masyarakat akan dapat ditingkatkan. Kegiatan pengembangan perpustakaan diarahkan kepada peningkatan penyempurnaan semua jenis perpustakaan di seluruh Indonesia berdasarkan koordinasi, integrasi, rasionalisasi, desentralisasi dan demokrasi.

Berdasarkan hal ini maka diharapkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpustakaan akan lebih dipenuhi.

Secara lebih terperinci maka kegiatan yang akan dilakukan selama Pelita III mencakup :

- (1) Penyediaan naskah buku yang bersifat langka namun diperlukan untuk pembangunan umpamanya buku ilmiah populer dan buku mengenai lingkungan hidup. Buku ini baik merupakan karya asli maupun terjemahan. Naskah ini akan diterbitkan oleh perusahaan swasta dengan harga yang relatif rendah agar tersebar secara merata dan dapat dijangkau masyarakat luas.

Untuk itu diciptakan iklim dan kebijakan yang mendorong yang berupa pemberian bantuan untuk meringankan ongkos cetak dengan garansi pasar. Yang dimaksudkan dengan garansi pasar adalah jaminan pihak pemerintah untuk membeli sejumlah buku dan majalah tertentu yang diterbitkan oleh

perusahaan swasta. Dalam hubungan ini akan diusahakan terciptanya sistem pendistribusian yang efektif;

- (2) Penataran penulis, penterjemah, editor dan ilustrator dalam jenis-jenis penerbitan tertentu;
- (3) Mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk-bentuk penelitian, seminar dan lokakarya sebagai bahan untuk menyusun peraturan — perundangan dan kebijakan pemerintah dalam bidang perbukuan, kegrafikaan dan hak cipta;
- (4) Meningkatkan gairah membaca di kalangan masyarakat dengan jalan (a) mengorganisasikan Pekan Buku Nasional (b) mendorong gerakan gemar membaca (c) mengadakan sayembara penulisan buku terbaik dan (d) mendorong kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi ikatan pengarang, penerbit, penterjemah, pencetak dan sebagainya;
- (5) Memberikan hadiah bagi mereka yang berprestasi menonjol dalam bidang perbukuan;
- (6) Mengembangkan Badan Pengembangan Buku Nasional;
- (7) Menjajagi kemungkinan peningkatan Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Badan Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan pengadaan Perpustakaan Nasional yang eselonnya ditingkatkan menjadi eselon I;
- (8) Mengembangkan perpustakaan nasional yang berupa pengintegrasian komponen-komponen perpustakaan nasional, pemilihan dan pengadaan bahan-bahan pustaka Indonesia dan asing;
- (9) Mengembangkan bibliografi dan karya cetak Indonesia yang meliputi pemilihan dan pengadaan karya cetak Indonesia; meningkatkan penerbitan Majalah Bibliografi Nasional tiga bulanan, kumulasi tahun dan kumulasi lima tahunan; penerbitan berbagai macam bibliografi subyek; dan pengembangan katalog induk nasional bidang kemanusiaan serta ilmu-ilmu sosial;
- (10) Meningkatkan teknis perpustakaan dengan jalan menerbitkan berbagai jenis direktori bidang perpustakaan, berbagai jenis manual tentang kerjasama perpustakaan, berbagai jenis

sarana bibliografi terjemahan dari bahasa asing, dan menerbitkan revisi daftar tajuk subyek; menyelenggarakan survey dan evaluasi semua jenis perpustakaan; mempersiapkan ke arah penggunaan sarana-sarana mekanis dalam : pengolahan dan penyimpanan data bibliografi nasional dalam rangka kerja sama internasional; menyusun/mempersiapkan Undang-Undang Perpustakaan dan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Indonesia; mempersiapkan ke arah pengetrapan Internasional Standard Book Number (ISBN); dan melaksanakan Nasional Information System (NATIS);

- (11) Mendidik/menatar tenaga pustakawan dalam berbagai tingkatan dan jenis untuk berbagai jenis perpustakaan dan mengusahakan pengiriman tugas belajar ke luar negeri baik untuk mencapai gelar maupun untuk latihan;
- (12) Meningkatkan jasa Perpustakaan Negara (Perpustakaan Wilayah) yang telah ada dan mendirikan Perpustakaan Negara (Perpustakaan Wilayah) di propinsi-propinsi yang belum ada; mengembangkan penerbitan Majalah Bibliografi Daerah meliputi semua propinsi di seluruh Indonesia; dan mengembangkan katalog induk daerah di tiap-tiap Ibukota propinsi di seluruh Indonesia dan sebagainya;
- (13) Membina dan meningkatkan Perpustakaan Umum meliputi perpustakaan umum Kabupaten/kodya, kecamatan dan desa dengan menerbitkan manual; menambah koleksi dan merintis sistem pengelolaan perpustakaan umum serta meningkatkan program dan jasa perpustakaan umum dengan promosi perpustakaan; memperluas jasa perpustakaan keliling; menyempurnakan pilot proyek perpustakaan taraf desa dan mengadakan berbagai kegiatan pilot proyek yang lain;
- (14) Membina dan meningkatkan Perpustakaan Sekolah dengan cara menerbitkan standar ruang dan perabot, buku petunjuk penyelenggaraan perpustakaan sekolah; daftar buku dengan anotasi serta buletin perpustakaan sekolah; dan memperluas pilot proyek Perintis Perpustakaan Sekolah;
- (15) Menyediakan sarana berupa pembangunan gedung Perpustakaan Nasional dalam proyeksi pengembangan 50 tahun sebagai kelanjutan dari Pelita II; pembelian perabot dan per-

lengkapan serta sarana mobilitas berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua untuk Perpustakaan Nasional sebagai kelanjutan dari Pelita II, dan untuk Pusat Pembinaan Perpustakaan dan Perpustakaan Negara (Perpustakaan Wilayah); pembangunan perumahan pegawai; pengadaan gedung, rehabilitasi dan remodelling gedung Perpustakaan Negara (Perpustakaan Wilayah); penambahan perpustakaan keliling; pengadaan perabot dan penambahan perlengkapan kantor Pusat Pembinaan Perpustakaan.

V. HARAPAN DAN SARAN

Dapat dikatakan bahwa sama besarnya permasalahan yang ada dengan ruang lingkup bidang yang digarap yaitu kebudayaan.

Sejauh dalam batas formil sebagai lembaga negara, Departemen Pendidikan & Kebudayaan cq Direktorat Jenderal Kebudayaan memang mempunyai tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. Namun sebagai lembaga negara yang mempunyai lingkup nasional tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mencapai sasaran kebudayaan secara nasional seperti, yang terserat dan tersusun dalam Pancasila, UUD '45 dan GBHN.

Dengan diambilnya langkah-langkah yang perlu dalam Bab IV, kami harapkan agar kehidupan kebudayaan yang dicita-citakan bersama dapat dicapai, setidaknya jalur yang ditempuh di samping benar juga merupakan jalur pendek. Sudah barang tentu hal ini harus dibarengi dengan pengurangan bahkan kalau dapat menghapuskan permasalahan yang selama ini merupakan rintangan bagi pelaksanaan pencapaian sasaran kebudayaan seperti yang telah dikemukakan di atas. Sarana, dana, dan tenaga dalam hal ini mempunyai peranan dalam proses pengembangan kebudayaan nasional. Karena itu pula program pencukupan sarana & tenaga perlu ditingkatkan.

Dengan rumusan kebijakan dan program-program kebudayaan yang akan dilaksanakan dalam perioda Repelita III dapat lebih berhasil dan mencapai sasaran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Atas dasar garis-garis kebijakan beserta program kegiatan yang telah dirumuskan dan pula proses pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dapat disimpulkan, bahwa masih banyak yang perlu diselesaikan dalam hal pengadaan sarana dan pembinaan tenaga, sehingga usaha-usaha pembinaan dan pengembangan

kebudayaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, baik yang menyangkut peningkatan mutu maupun pemerataannya.

Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyarankan agar langkah-langkah yang telah dilakukan dapat dipercepat, sehingga cepat pula sampai pada tujuan. Kebudayaan Indonesia sebagai cermin kepribadian bangsa, kelestariannya harus tetap dapat dipelihara. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa yang didasarkan pada Pancasila dan UUD '45, serta pelaksanaannya berpegang pada GBHN akan dapat menuju masyarakat yang berbahagia, hidup dalam persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh Bhineka Tunggal Ika.

Akhirnya selamat bekerja.

Jakarta, 18 September 1978.
Prof. Dr. I. B. Mantra.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEGIATAN KEBUDAYAAN YANG BERTKAITAN DENGAN LUAR NEGERI

Lampiran : 1

No. Urut	Nama Proyek	Keputusan/Rekomendasi	Keterangan
A.	<u>MALAY CULTURE</u>		
1.	Workshop on the Establishment of a Regional Centre on Documentation for the Study and Presentation of Visual and Performing Arts.	1. Untuk Regional Centre on Documentation for the Study and Preservation of the visual and Performing Arts, kontraknya sudah ditanda tangani.	Diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 16 — 19 Juni 1976.
2.	Regional Workshop on Music in Kalimantan Timur	Draft Report/Rekomendasi menunggu pengesahan Dr.J.Maceda a.l. Hendaknya Workshop y.a.d. dapat dihadiri oleh banyak ahli-ahli riset dari berbagai negara dan biayanya hendaknya disediakan lebih besar.	Diselenggarakan di Kalimantan Timur dari tgl. 31 Maret s/d. 22 April 1977.
3.	Oral Tradition a) Directory of Institutions and Research Chers b) Annotated bibliography	Telah ditanda tangani kontrak tersendiri uang tukaran sebanyak M \$ 2.500 telah dikirim dan kekurangan sebanyak US \$ 1000.— akan segera diserahkan.	Pihak Indonesia diwakili oleh Prof. Dr. Haryati Subadio dan telah mengirimkan bahannya kepada Prof. Taib Osman Pihak Indonesia diwakili Sdr. James Dananjaya.
4.	Album on Malay Culture a) Malay Art Album/Sriwijaya	Pihak Indonesia diwakili oleh Dra.Ny. Sulaiman dan telah menanda tangani kontrak No. 272. 291 dengan UNESCO.	Editor Prof. Diskul dari Muangthai.

b) Album on Malay Folk Art

5

Language

6

Documentation and Bibliography

7

Social and cultural development

Hendaknya diadakan suatu pertemuan membahas arsitektur tradisional Minangkabau dan Batak Toba di Medan.

Pihak Indonesia diwakili oleh Sdr. Koesnadi Direktorat Pembinaan Kesenian.

Dr. Llaanzon — Philipina
Dr. Asnah — Malaysia
Konperensi di Bali
16 — 17 Feb. 1975.

Suatu Pertemuan telah dilangsungkan di Singapura, April 1976.

— Kegiatan yang telah dilakukan Indonesia.

- Seminar Inventarisasi dan Dokumentasi Folklore Indonesia.
- Seminar Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Indonesia (Visual and Performance art)
- Penelitian tentang Agama, struktur sosial dan tingkah laku ekonomi. Oleh Prof. Dr. Sartono.
- Penelitian tentang kesultanan (sultanates). Oleh: Prop.Dr. Sartono.
- Mengikuti workshop I tentang Sultanates di Kuala Lumpur, di-

- 8.B **Proyek Pemugaran Candi Borobudur**
- C Meeting
- 9 **Advisory Committee Sidang Pertama (I)**
 a) Sidang ke II
- b) Bureau Meeting
- 10 **Sidang ke II Experts Meeting on Regional Cooperation on UNESCO Cultural**
- 11 **Meeting of Experts on the restitution of Works of Arts & Other Cultural Obyects**
- 12 **Symposium on Bronze Culture in East and South — East Asja**

hadiri oleh Dr.Mattulada, Dr.F.A. Sucipto dan Drs. Idwan Saleh

Di Bali — 1974.

Direncanakan Sidang akan dilangsungkan pada th. 1977, sesudah UNESCO mendapat jawaban dari Madagaskar.

Sidang Pertama diadakan di Jakarta pada bulan Maret 1976.

Sidang Kedua di Bangkok 12 — 16 Juli 1976 dihadiri oleh Prof. Dr. I.B. Mantra.

Di Tokyo tgl. 7 — 11 Desember.

Dihadiri oleh Prof. Dr. I.B. Mantra.

Di Kairo tgl. 20 Maret — 3 April 1976.

Dihadiri oleh Drs. Bambang Soemadio.

Di Bangkok tgl. 5 — 9 Juli.

Dihadiri oleh Drs. R.P. Soejono.

- 13. Regional Seminar on the adaption of Museum in Asia to the Needs of the modern World
- 14. Seminaire international de formation a l'administration des affaires culturelles World Craft Council
- 15. World Craft Council
- 16. Expert Meeting on the Proyect of Album on Malay Folk Art
- 17. Seminar on the Social and Cultural impacts of tourism
- 18. Meeting of Representatives of Research Institution in Asia
- 19. Study on Islamic Culture

-
-
-
-
-
-
-

A Comperative Study of tradisional Cultural Values in Asian Countries

- Di Tokyo dan Kyoto 22 - 27 Maret 1976. Dihadiri oleh Drs. Amir Sutaarga.
- Di Perancis tgl. 13 - 29 Maret, dihadiri oleh Drs. Moh. Amir Sutaarga.
- Di Mexico tgl. 31 Mei - 16 Juni 1976 dihadiri oleh Sdr. Koesnadi.
- Di Bangkok tgl. 7 - 11 Desember 1976 dihadiri oleh Sdr. Koesnadi
- Di Washington tgl. 8 - 10 Desember 1976. Dihadiri oleh Gusti Ngurah Bagus Udayana Denpasar.
- Diadakan di Tokyo 10 - 16 Maret 1976. Belum ada tanggapan/jawaban.
- Direncanakan diadakan di Quartar bulan Mei 1977. Calon-calon wakil Indonesia:

Prof. Dr. Rasjidi
Drs. Uka Tjandrasas-
mita
Drs. Bahrum Rangkuti.

Di Paris 20 Nopember
— 20 Desember 1976.
Diikuti oleh Sdr. Drs.
P. Wayong.

Di New Delhi 1 — 11
Januari 1977
Diikuti oleh V.J. Herman

Di Venice, Italia 27
April — 30 Juni 1978.
Diikuti oleh Sdr. Samidi,
dari PPCB.

Di Negeri Belanda
1 Mei 1978 (1 tahun).
Diikuti oleh Drs. Edwar
Djamaris.

- | | | |
|-----|--|---|
| D | <u>B E A SISWA</u> | |
| 20. | UNESCO Fellowship in Documentation
for Cultural Development | — |
| 21 | International Center for Coservation | — |
| 22 | Course on the preservation and treatment
of stone | — |
| 23 | Malay Culture Study — UNESCO | — |

**PELAKSANAAN KEGIATAN
HASIL SIDANG KE VI ASEAN PANITIA TETAP KEGIATAN SOSIAL BUDAYA
SINGAPURA 7 - 9 DESEMBER 1976
Khusus Bidang Departemen P dan K.**

88

No.	Nama Proyek	Keputusan/Rekomendasi	Keterangan
A.	<p>REVIEW OF COMPLETED AND ON-GOING PROYECTS.</p> <p>1. Asean Museum Experts Meeting yang pertama di Jakarta tgl. 16 - 18 Januari 1975.</p> <p>2. ASEAN Summer Field School in Archeology</p> <p>3. ASEAN art and Photographic Exhibition</p>	<p>Association of ASEAN Museum diminta menyerahkan perubahan-perubahan anggaran Dasarnya kepada Sidang ASEAN P.C. on Socio-Cultural Activities</p> <p>Field School in Archaeology ke 2 akan diselenggarakan oleh Philipina. Tanggal penyelenggaraannya akan diberitahukan kemudian.</p> <p>1. Sidang menganggap pameran semacam ini sangat bermanfaat dan disetujui untuk dilanjutkan diadakan berkeliling di negara-negara Anggota ASEAN.</p> <p>2. Sidang menyetujui bahwa yang akan dipamerkan ialah photo-photo, graphies dan lukisan-lukisan orisinal.</p> <p>3. Sidang menyetujui agar Museum Nasional/Balai Budaya (Art Galleries) di Negara-Negara Anggota ASEAN diminta untuk mengurus pengepakan serta pengiriman benda-benda pameran.</p>	<p>Direktorat Museum Sidang I Executive Board ASEAN Museum Association akan diadakan di Singapura dalam tahun 1977 (belum ada laporan).</p> <p>1. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.</p> <p>2. Untuk diajukan pembiayaannya ke Sek.Jen. Departemen P dan K.</p> <p>1. Direktorat Pembinaan Kesenian a. Perencanaan anggaran b. Menghubungi Direktorat Museum</p> <p>2. Biro Kerjasama Luar Negeri Dep. P dan K.</p> <p>3. Dit. Jen. Kebudayaan. a. Sesuai permintaan Dir. Hub. Keuangan Internasional, Dep. Keuangan, telah diajukan dengan surat No. 228/E-2/1978 tgl. 15 Pebruari 1978. b. Mengenai perincian pembiayaan sebagaimana tercantum dalam kertas kerja Malavsia dalam si-</p>

4. **Exchange of Designer-Craftman of ASEAN Member Countries**

4. **Exchange of Designer Craftman of ASEAN Member Countries**

5. **ASEAN Sub Committee on Education**

4. Kertas kerja Malaysia dijadikan pedoman umum dalam penyelenggaraan pameran.
5. Penggunaan Dana Asean untuk proyek ini agar diajukan ke P.C. on Finance" untuk dipertimbangkan oleh P.C. tersebut.
6. Indonesia menawarkan untuk mengkoordinir penyelenggaraan "ASEAN Art and Photographiec Exhibition" ke-2 dalam tahun 1978 yang bertepatan dengan peringatan ke-200 tahun Museum Nasional pada tanggal 24 April 1978.

Sidang menyetujui "Report on ASEAN experts on Design and Crafts" yang diadakan di Jakarta tanggal 28 - 30 Juni 1976, kecuali rekomendasi.

a. Nomor 5

Formulasi untuk "agreement on design copyright" perlu dipelajari oleh masing-masing negara anggota.

b. Nomor 7

Biaya pertukaran para pengrajin dan disainer ditanggung oleh masing-masing negara.

1. Sidang menyetujui "Report on ASEAN Sub Committe on Education" yang diselenggarakan di Manila tanggal 21 - 23 Oktober 1975.

dang P.C. on Socio Cultural Activities (29 - 31 Juli 1975 di Singapura).

- c. Sebagai bahan untuk diajukan dalam rapat ASEAN Committee on Budget tanggal 28 Pebruari - 1 Maret 1978 di Singapura.

Atas permintaan Indonesia penyelenggaraannya ditangguhkan Surat ~~ke~~ Karo Sosbut Setnas ASEAN No. : 254/E-2/1978 tanggal 21 Pebruari 1978.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Dep. P dan K.

B. REVIEW OF PROYECTS FOR IMPLEMENTATION.

6. ASEAN Folks Art Festival
7. ASEAN Dance Workshop
8. ASEAN Litorary Award

2. Agar "Task Force" segera dibentuk yang akan bertugas mengadakan survey ke Negara Negara Anggota ASEAN.
3. Biaya perjalanan Task Force akan diperoleh dari Pemerintah Australia.

Philipina akan menyelenggarakan Festival ini pada tanggal yang dapat disetujui oleh semua Negara anggota.

Philipina akan menyelenggarakan Workshop ini dan tanggal penyelenggaraannya akan diberitahukan kemudian kepada negara-negara anggota ASEAN.

1. Untuk bidang kesusasteraan di sediakan hadiah dari Dana ASEAN sebesar US \$ 4,500.— untuk bidang-bidang fiction, non-fiction dan poetry/drama masing-masing US \$ 1,500.—
2. Koordinator : Thailand.
3. Batas waktu penyerahan/penerimaan karya-karya dari negara anggota *akhir Mei 1977*
4. Pengumuman hasil pemenang diharapkan bertepatan dengan ulang tahun ASEAN ke-10.

Direktorat Pembinaan Kesenian Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan : Rencana pembiayaannya sampai sekarang belum ada berita dari Philipina.

Direktorat Pembinaan Kesenian Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan : Rencana pembiayaannya. Sampai sekarang belum ada berita dari Philipina.

Dit.Jen. Kebudayaan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- a. mengadakan sayembara
- b. perencanaan biaya

Dilaksanakan (Meeting of judging Panel) tgl. 20 — 22 Desember 1977 di Bangkok.

Indonesia mendapatkan hadiah (novel) "Ziarah" karangan Iwan Simatupang).

9. **ASEAN Logo Competition**

1. Untuk ini disediakan hadiah dari Dana ASEAN sebesar US \$ 500.-
2. Kordinator : Singapura
3. Hasil pemenang (Logo terpilih tingkat Nasional) sudah harus diterima Singapura dalam bulan April 1977.

10. **ASEAN Language Studies Programe**

Pelaksanaan ini diserahkan kepada negara masing-masing. Jika telah ada bahan-bahan untuk "language studies" supaya diperluas saja.

Tambahan :

Conference of ASEAN Writes

Surat Kementerian Luar Negeri Malaysia AT 116/77 tanggal 19 Juli 1977.

Untuk mengadakan persidangan penulis-penulis ASEAN dengan thema "ASEAN understanding through Literature".

11. **P.C. on Socio — cultural activities, ASEAN.**

1. Sidang ke I di Manila, dihadiri oleh Prof. Dr. I. B. Mantra.
2. Sidang ke II di Manila, delegasi Indonesia diketuai Ny. Rosiah Sarjono.
3. Sidang ke III di Manila, delegasi Indonesia diketuai oleh Ny. Rosiah Sarjono, dari Ditjen Kebudayaan Abas Alibasyah.
4. Sidang ke IV di Singapura, delegasi Indonesia diketuai oleh Ny. Rosiah Sarjono, dari Ditjen Kebudayaan Drs. Suwondo.

Direktorat Jenderal Kebudayaan

- a. Mengadakan sayembara Nasional
 - b. Perencanaan pembiayaan
- Diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 1978. Pemenangnya Malaysia.

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pendidikan Tinggi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Diselenggarakan pada tanggal 1 — 3 Desember 1977 di Kuala Lumpur.

Tahun 1971.

Tgl. 29 Mei — 1 Juni 1972.

Tgl. 27 — 30 Maret 1973.

Tgl. 29 — 31 Oktober 1974.

5. Sidang ke V di Singapura, delegasi Indonesia diketuai oleh Ny. Rosiah Sarjono dan Wakil Ketua Prof. Dr. I. B. Mantra.
6. Sidang ke VI di Singapura, delegasi Indonesia diketuai oleh Harun Al Rasjid, dari Ditjen. Kebudayaan Drs. Amir Sutarga.
7. Sidang ke VII di Bangkok, delegasi Indonesia Dr. Setiadi dari BP3K.

Catatan.

1. Setelah sidang P.C. on Socio-Cultural Activities, sidang selanjutnya adalah sidang I Committee Social Development, tgl. 23 -26 Mei 1978.
2. Sesuai hasil sidang KTT ASEAN di Kuala Lumpur tgl. 4 - 5 Agustus 1972, dibentuk 3 Committee untuk Non Economic Activities, yaitu
 1. Committee on Social Development
 2. Committee on Culture and Information
 3. Committee on Science and Technology.

Tgl. 29 - 31 Juli 1974.

Tgl. 7 - 9 Desember 1976.

Tgl. 22 Mei 1978.

- dibentuk tgl. 26 - 5 - 1978 di Bangkok.

- dibentuk tgl. 12 - 1 - 1978 di Singapura.

- dibentuk tgl. 22 - 11 - 1978 di Manila.

SEMINAR WORKSHOP

TANGGAL/TAHUN	N A M A	SEMINAR/WORKSHOP	T E M P A T
27 - 30 Agustus 1969	International Conference of the Traditional Drama and Music of South Asia		Manila
Agustus 1971	Ramayana Festival	Seminar	Pandaan - Jawa Timur, Indonesia
10 - 19 Desember 1973	Asia Cult (Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Asia.	Seminar/Konperensi	Jogyakarta - Indonesia
16 - 19 Juni 1976	Workshop on the Establishment of a regional Centre on Documentation for the Study and Presentation of visual and Performing Arts.	Seminar	Jakarta - Indonesia.
31 Maret - 22 April 1977	Regional Workshop on Music in Kalimantan Timur	Seminar/Research on the Spot	Jakarta dan Kalimantan Timur, Indonesia.
1975 10 - 22 Nopember 1975 I	Pertemuan Tim Ahli Benda-Benda Sejarah Budaya Indonesia - Belanda	Meeting	Jakarta, 10 - 22 Nopember 1975
30 Juni - 22 Juli 1976 II	--,"--	--,"--	Negeri Belanda.
20 - 22 April 1978 III	--,"--	--,"--	Jakarta.

PAMERAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

Tanggal	Pameran	Tempat
Oktober 1971 — Juli 1972	Pameran benda-benda kuno Indonesia	Amerika Serikat
20 Februari s/d Desember 1973	Pameran Patung Budha Amoga Sidhi	Jepang
28 Januari s/d 28 Juni 1978	Pameran Benda-benda Borobudur	Belgia — Negeri Belanda — Australia — Swiss — Perancis.
16 Juli — 31 Agustus 1977	Pameran Fossil	Jepang
<u>PAMERAN ASING</u>		
1971	Australian Books Exhibition	Indonesia
1971	Australian Graphic Art Exhibition	Indonesia
1971	Australian Contemporary Art Exhibition	Indonesia
1972	Pameran Kerajinan India	

Tahun	Lain-lain	Keterangan
1976/1978	<p data-bbox="633 247 989 304">Pengembalian benda-benda kuno Indonesia dari Negeri Belanda</p> <p data-bbox="633 405 994 492">Dueklin Nippon Kai mendapat izin untuk menterjemahkan ke dalam Bahasa Jepang</p>	<p data-bbox="1154 247 1259 270">Asal Irian</p> <ol data-bbox="1154 405 1459 492" style="list-style-type: none"> 1. Bali — Atlas Kebudayaan 2. Bali — Isle of Temples & Dances.
1971	<p data-bbox="633 596 994 716">Beasiswa untuk 2 orang Australia pemenang sayembara dalam Bahasa Indonesia untuk berkunjung ke Indonesia.</p>	

R I S E T A S I N G

88

No. Urut	N a m a	Warga Negara	Obyek riset	Lokasi Riset	Waktu Riset	Keterangan/ Sponsor
1.	Mrs. Dr. Margaret kartomi	Australia	Seni musik tradisional se Sumatera Utara	1. Prop. Sum. Utara 2. Prop. Sum. Sel	Desember 1970 s/d Januari 1971 Nop. — Desember 1971	Surat Izin LIPI Survey pendahu- luan
2.	Mrs. Mattebele Gittinger	U S A	Tenun asli/kain kapal	Bengkulu Selatan	Th. 1971	Surat Izin LIPI
3.	Dr. J. Kamorki	Polandia	Ethnologi dan Ethnografi	Prop. Sumatera dan N T B	Th. 1970	
4.	Hisaski Idee	Jepang	Kebudayaan Sriwijaya	Prop. Sumatera Selatan.	Th. 1971	
5.	Prof. Princen Montel	Perancis	Kepurbakalaan Islam	Bekas kerajaan Samodera : Pasai Aceh	Th. 1970	
6.	Mac. Donald	U S A	Sejarah Perkembangan agama Islam	Kerajaan Samodra Pasai Aceh.	Th. 1971	
7	Ann Snit	Perwakilan Unicef di Indonesia.	Checking hasil dan aktivitas P L P.M bantuan Unicef.	Propinsi Jawa Timur	Th. 1971.	
8	David Golds Worthy	Australia	Musik tradisional Melayu dan pantun Melayu.	Sumatera Utara	April — Oktober 1973	
9	Gloria Davis	U S A	Kebudayaan transmigran Balai Lokasi Tolai/Parigi.	Tolai/Parigi Sulawesi Tengah	Nopember 1972 s/d April 1974.	
10	Prof. Albert	Jerman Barat	Bidang Kesenian Klasik Daerah Aceh.	Prop./Daerah Istimewa Aceh.	Th. 1973	

11.	Dr. Bennet Bronson	U S A	Peninggalan purbakala (kuno) batu bersurat, perbentengan kuno, dan batu-batu megalitik (penelitian arkeologi).	a. Sum. Sel (I) b. Daerah Lampung c. Sum.Sel. (II)	Th. 1971/1972 Tg. 22 — 25 Mei 1973 Tg. 15 Juli 1974	Diterima Jan Wisseman dan Jerome Brown mengadakan Ekskavasi Arkeologi.
12.	Dr. Magdalene V. Dewall	Jerman Barat	Sejarah Kerajaan Sriwijaya	Daerah Sumatera Selatan	Th. 1972	
13.	Keith A. Dixon	U S A	Penelitian megalith Pasemah	Daerah Sumatera Selatan	Th. 1973	
14.	Mr. Bicus	Perwakilan Unicef di Indonesia	Meninjau Perpustakaan dan checking aktivitas PLPM Mojoagung	Prop. Jawa Timur	Th. 1973	
15.	T. Daryl Cellius	Australia	Study Oksevasi di Museum Mojokerto, Trowulan Candi Brahu, Wringin Lawang Museum dan Candi Jawi.	Prop. Jawa Timur.	Th. 1974	
16.	Judith Auckland M.A.	U.S.A.	Penelitian Antropologi	Seluruh Pulau Lombok	Juli 1973 s/d Juli 1975.	
17.	Dr. Cebass	S w i s	Musik tradisional (daerah) Lombok.	Seluruh Pulau Lombok	Th. 1974.	
18.	Ingela Gerdin	Swedia	Anthropologi Sosial	Pagesangan, Pagutan dan Cakranegara Kab. Lombok Barat	Mei 1974 s/d Mei 1976.	
20.	Sven Chederoth	Swedia	Anthropologi Sosial	Bayan, Tanjong Kab. Lombok Barat	Mei 1974 sd Mei 1976	
21.	Dennis Blayer M.A.	U S A	Sejarah dan Anthropologi. bidang pengobatan tradisional	Seluruh Lombok	Mei 1974 sd. Mei 1976	

22	Mrs. Roline	U S A	Sejarah Purbakala	Bengkulu	21 Pebruari 1974	Izin Dep. Luar Negeri No. J. 1108771.
23	M. Hodgin	U S A	sda	sda	sda	No. 8445
24.	Mrs. Barbara	U S A	sda	sda	sda	No. J. 92268
25	Dr. Bernd Jocolo- per	Jerman Barat	Kebudayaan dan Bahasa Eng- gano	Enggano Prop. Bengkulu.	Th. 1974	Sda.No.E.1024
26	Brendgent	Belanda	Tempat-tempat bekas per- tempuran antara rakyat Aceh dan Belanda serta kuburan tentara Belanda	Aceh Utara	Th. 1974	
27	Mr. Olof Ekendahl.	Swedia	Mempelajari Kebudayaan orang Bali di Parigi	Sulawesi Tengah	Desember 1973 s/d. Januari 1974.	
28	Mrs. Jans Monting Atkinson	U S A	Mempelajari cara hidup/Ke- hidupan orang Wana.	Daerah Pegunung- an Ulu Bangka, Kab. Poso Sul Tengah Kabupaten Sam- bas Kalimantan Barat	Juli 1974 s/d Juli 1976	
29	Dr. Muji Joshida	Jepang	Benda-benda ethnografica	Kabupaten Sam- bas Kalimantan Barat	Tg. 24 — 28 No- pember 1975	
30	Mc. Kennon	Inggris	Kuburan raja-raja Islam dan peninggalan kepurbakalaan	D.I. Aceh	Th. 1975	
31	Mik Hassan Shuhai- mi.	Malaysia	Peninggalan Kerajaan orang Bali di Parigi	Sulawesi Tengah.	Desember 1973 sd. Januari 1974	
32.	Prof. Dr. Pott	Belanda	Study Observasi candi-candi (peninggalan) di Mojokerto (Trowulan dan sekitarnya, Malang Tretes dan Museum Pugen	Propinsi Jawa Timur	Th. 1975	

33.	Jessrey D. Brewer M.A.	U S A	Anthropologi dan sosial tehnik pertanian.	Nusa Tenggara Barat.	Agustus '75 s.d. Agst. 77	
34.	Miss Ruth Mogan Ballinger	U S A	Seni tari Klasik Bali	Bali	Januari 1974 s.d. April 1975	Bidang Seni Tari yang berjudul "gambuh : Bali's Classical Dance Forms"
35.	M. Richard M Wallis	U S A	Seni musik dan literatur tradisional Bali	Bali, Lombok dan Jawa Bagian Timur	Maret 1975 s.d. September 1975	
36.	Mr. John Pember-ton.	U S A	Kebudayaan dan Kesenian Jawa (tari, batik modal rambut, karawitan dlsb.)	Jawa	Th. 1975	Disertai isterinya
37.	Mr. D.J.Goldsworthy	Australia	Seni pantun	Sulawesi Utara	Nopember 1974 s.d. Maret 1975	sda.
38.	Mr. Warick James Greenwood	sda.	Bidang Kesenian	Bali	Th. 1975 — 1976	sda.
39.	Mr. Ramangalahy	Malaysia	Bidang Malay Culture	Beberapa daerah di Indonesia	4 Desember 1974 s.d. 14 Januari 1975	UNESCO
40.	Mr. Evic Delson	U S A	Meneliti daerah-daerah fosil (daerah penyebaran/diketemukan fosil)	Jawa (khususnya Jawa Tengah).	Direncanakan tahun 1975	Kerjasama dengan Prof.Dr.T. Jacob
41.	Mirss Joane Catherine Prindville	Kanada	Bidang Anthropologi	Sumatera Barat Medan	April 1975 s.d. April 1977	
42.	Rombongan mahasiswa University of Hawaii.	Hawaii (USA)	mempelajari/study gamelan dan tari	Yogyakarta dan Surakarta	1 Juni — 21 Agst 1975	Pimpinan Prof. Hardjo Soesilo
43.	Mr.David Cox + Mrs. Betty Beath	Australia	Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan	Jawa dan Bali	Agustus — Oktober 1975	
44.	Henry Cambert Loir	Perancis	Sastra Hikayat Aceh dalam bentuk puisi dan prosa.	Aceh Utara.	Tahun 1976	

45.	Abd. Jalil Usman	Malaysia	Studi Observasi candi-candi (Candi Jawi Singosari dan Trowulan).	Jawa Timur.	Tahun 1976.	
46.	Mr s. Christina Summer Petts		Bidang Kesenian daerah Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku.	Daerah Istimewa Aceh	Mei 1976 — Mei 1977	Bersama-sama dengan suaminya.
47.	Mr. David Johnson		Bidang ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan.	Jawa	September — Desember 1976.	
48.	Dr. J.J. Ros	Belanda	Bidang filologi, Kesusasteraan Jawa Modern, pedalangan, ludruk dan ketoprak.	Jawa Tengah dan Jawa Timur	Pertengahan tahun 1976 (3 bulan).	
49.	M. Alexander Gota	Jerman Barat	Bidang Seni Tari dan Musik Bali.	Bali	Th. 1976 (6 bulan)	Disertai dengan isterinya (Catatan: ditunda sesudah Pemilu 77)
50.	Mr. Enie Panwels	Belgia	Teater dan Tarian Bali	Bali	Th. 1976.	
51.	Mr. Gabriele Schmidt.		Kesenian dan Kebudayaan Bali (khususnya seni lukis).	Bali	Pebruari — Juli 1976.	
52.	Dr. U Po Kay	Burma	Obyek-obyek kepurbakalaan (candi dsb).	Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali.	Th. 1976 (Agustus — Oktober).	
53.	Wilhelm G. Soleiur II	Austria	Kepurbakalaan di Irian Jaya.	Irian Jaya	9 Januari — 31 Mei 1976.	
54.	Mrs. Theisen	Austria	Adat kebiasaan, dongeng dan tarian rakyat Bali.	Bali.	Agustus — September 1976	Juga mempelajari sejarah perkembangan Indonesia.
55.	Prof. Dany Lombard	Perancis	Peninggalan kuno dan makam di kerajaan Islam Pertama di Indonesia : Samodera Pasai.	Aceh Utara.	30 Juli — 1 Agustus 1976	

56	Mrs. Frigitte Schaap Holster	Belanda	Aspek-aspek pembatikan dan proses pembuatan "ikat di Bali".	Jawa, Sumatera dan Bali.	Th. 1976
57	Dr. Linda G. Burma — Hall.	U S A	Seni Musik Madura.	Pulau Madura.	Th. 1976
58	Dr. John K. Miksic	USA	Kepurbakalaan di Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan.	Sumatera	Nopember 1976
59	Mrs. Cheryl Rimet	Australia	Gamelan Degung (kesenian Sunda).	Jawa Barat.	Thn. 1976
60	Suzanne Benton		Masalah mistik dan seni melalui penciptaan topeng (topeng tradisional).	Jawa, Bali dan Kalimantan.	Nopember - Desember 1976
61	Mr. Andrew F. Toth	U S A	Kesenian daerah (seni musik daerah).	Jawa, Bali dan Lombok.	Nopember 1976 s/d. Januari 1977
62	Mrs. Barbara L. Hatley	Australia	Riset "Ketoprak" dan Karawitannya.	Yogyakarta, Surakarta dan Semarang.	(1 tahun) Th. 1977 sd th. 1978
63	Mis. Mary Kathleen Foley	Hawaii (USA)	a. Kebudayaan daerah	Jawa Barat	Th. 1977 s/d. 1978
			b. Wayang golek	Jawa dan Bali.	
64	Mr. Rudiger Schumacher	Jerman Barat	Bidang Kesenian & Wayang purwo dan seni musik.	Jawa Tengah.	Th. 1977
65	Mr. Wan Muhammad Syahrir Abdullah	Malaysia	Sejarah Ulama Nusantara.	Beberapa daerah di Indonesia.	Th. 1977
66	Dr. Tanimurra Ko	Jepang	Bidang Etno-musikologi.	Jawa dan Bali	Th. 1977 — 1978.
67	Prof. Andrian Hovidge	Australia	Riset mengenai zaman kuno (di Museum-museum).	Jakarta.	Th. 1977

68	Mr. Alexander Gotn	Jerman Barat	Kesenian "Balinese Dance and music" (seni tari dan musik Bali).	Jawa dan Bali	Agustus 1977 s/d. Agustus 1978	(lihat no. urut 49).
69	Drs. C. Cimagerand	Perancis	Bidang Etno Linguistik.	Daerah Sunda.	Th. 1978	
70	Dr. Rainer Carle	Jerman Barat	Penelitian tentang "teater masa Kini".	Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Utara.	Th. 1978	
71	Mrs. Anne Caufries	Belgia	Bidang Kesenian.	Jawa, Bali, Lombok dan Sulawesi.	Th. 1978	

**PERKEMBANGAN DAN PERBANDINGAN ANTARA ANGGARAN:
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DENGAN ANGGARAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Tahun / Uraian	Anggaran Departemen Pendidikan & Kebudayaan	Anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan	%
1969/1970			
I. Rutin	Rp. 12.672.957.200,-	Rp. 295.579.000,-	2,3 %
II. Pembangunan	Rp. 5.583.000.000,-	Rp. 188.000.000,-	3,3 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 18.255.957.200,-	Rp. 483.579.000,-	2,6 %
1970/1971			
I. Rutin	Rp. 16.818.862.800,-	Rp. 308.595.600,-	1,8 %
II. Pembangunan	Rp. 5.850.000.000,-	Rp. 205.685.000,-	3,5 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 22.668.862.800,-	Rp. 514.280.600,-	2,2 %
1971/1972			
I. Rutin	Rp. 20.904.615.200,-	Rp. 223.023.400,-	1,0 %
II. Pembangunan	Rp. 6.650.000.000,-	Rp. 205.685.000,-	3,0 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 27.554.615.200,-	Rp. 428.708.400,-	1,6 %
1972/1973			
I. Rutin	Rp. 27.758.476.800,-	Rp. 360.585.200,-	1,2 %
II. Pembangunan	Rp. 8.800.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	3,4 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 36.558.476.800,-	Rp. 660.585.200,-	1,8 %
1973/1974			
I. Rutin	Rp. 32.122.855.600,-	Rp. 509.564.600,-	1,5 %
II. Pembangunan	Rp. 9.840.000.000,-	Rp. 574.053.000,-	5,8 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 41.962.855.600,-	Rp. 1.083.617.600,-	2,5 %
1974/1975			
I. Rutin	Rp. 61.533.142.200,-	Rp. 695.849.200,-	1,1 %
II. Pembangunan	Rp. 24.648.000.000,-	Rp. 2.181.246.000,-	8,8 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 86.181.142.200,-	Rp. 2.877.095.200,-	3,3 %
1975/1976			
I. Rutin	Rp. 90.334.262.000,-	Rp. 1.191.004.000,-	1,3 %
II. Pembangunan	Rp. 50.544.000.000,-	Rp. 3.555.000.000,-	7,0 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 140.878.262.000,-	Rp. 4.746.004.000,-	3,3 %

1976/1977			
I. Rutin	Rp. 95.022.164.200,-	Rp. 755.737.000,-	0,8 %
II. Pembangunan	Rp. 69.722.604.100,-	Rp. 6.908.869.100,-	9,9 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 164.744.768.300,-	Rp. 7.684.606.100,-	4,6 %
1977/1978			
I. Rutin	Rp. 133.534.000.000,-	Rp. 1.047.331.000,-	0,7 %
II. Pembangunan	Rp. 86.244.325.000,-	Rp. 8.909.652.500,-	10,3 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 219.778.325.000,-	Rp. 10.056.983.500,-	4,5 %
1978/1979			
I. Rutin	Rp. 141.158.000.000,-	Rp. 1.174.952.000,-	0,8 %
II. Pembangunan	Rp. 117.553.000.000,-	Rp. 10.247.000.000,-	8,7 %
III. Rutin & Pembangunan	Rp. 258.711.000.000,-	Rp. 11.421.952.000,-	4,4 %

**DAFTAR : PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA ROUTINE
(NON PEGAWAI) ANTARA DITJEN.KEBUDAYAAN
DENGAN DEPARTEMEN P DAN K.**

TAHUN 1969/1970

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	47.602.000	1.795.194.000	2,6 %
2.	Belanja Pemeliharaan	14.181.000	82.571.000	17,1 %
3.	Belanja Perjalanan	14.164.000	184.501.000	7,6 %
J u m l a h		75.947.000	2.062.266.000	3,6 %

TAHUN 1970/1971

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	47.335.600	2.248.927.600	2,1 %
2.	Belanja Pemeliharaan	11.771.500	123.856.500	9,5 %
3.	Belanja Perjalanan	19.064.000	250.000.000	7,6 %
J u m l a h		78.171.000	2.622.784.100	2,9 %

TAHUN 1971/1972

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	99.820.000	2.435.307.100	4,9 %
2.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000	210.350.000	7,1 %
3.	Belanja Perjalanan	12.500.000	411.250.000	3,0 %
J u m l a h		127.320.000	3.056.907.100	4,1 %

TAHUN 1972/1973

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	145.120.000	4.652.865.000	3,1 %
2.	Belanja Pemeliharaan	27.500.000	568.600.000	4,8 %
3.	Belanja Perjalanan	12.500.000	458.550.000	2,7 %
J u m l a h		185.120.000	5.680.015.000	3,2 %

TAHUN 1973/1974

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	209.299.800	5.333.198.400	3,9 %
2.	Belanja Pemeliharaan	45.400.000	764.500.000	5,9 %
3.	Belanja Perjalanan	18.998.000	572.916.600	3,3 %
J u m l a h		273.697.800	6.670.615.000	4,1 %

TAHUN 1974/1975

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	232.500.000	6.381.809.000	3,6 %
2.	Belanja Pemeliharaan	81.000.000	1.820.900.000	4,4 %
3.	Belanja Perjalanan	20.100.000	578.700.000	3,4 %
Jumlah		333.600.000	8.781.409.000	3,8 %

TAHUN 1975/1976

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	405.637.000	11.754.770.000	3,4 %
2.	Belanja Pemeliharaan	134.459.000	2.426.782.000	5,5 %
3.	Belanja Perjalanan	42.955.000	1.288.773.000	3,2 %
J u m l a h		583.051.000	15.470.325.000	3,7 %

TAHUN 1976/1977

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	311.011.000	14.036.376.400	2,2 %
2.	Belanja Pemeliharaan	107.100.000	2.550.819.000	4,1 %
3.	Belanja Perjalanan	35.000.000	1.335.570.000	2,6 %
Jumlah		453.111.000	17.922.765.400	2,4 %

TAHUN 1977/1978

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	352.626.000	15.419.594.600	2,3 %
2.	Belanja Pemeliharaan	110.141.000	3.067.484.600	3,6 %
3.	Belanja Perjalanan	35.000.000	1.631.720.800	2,1 %
J u m l a h		497.767.000	20.118.800.000	2,5 %

TAHUN 1978/1979

No.	Jenis Pengeluaran	Ditjen. Kebudayaan	Departemen P dan K	Prosentage
1.	Belanja Barang	429.900.000	18.839.000.000	2,3 %
2.	Belanja Pemeliharaan	134.297.000	4.236.000.000	3,2 %
3.	Belanja Perjalanan	35.000.000	1.886.000.000	1,9 %
J u m l a h		599.197.000	24.961.000.000	2,4 %

**DAFTAR PERBANDINGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DENGAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor Urut	Tahun Anggaran	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Departemen Pendidikan & Kebudayaan	Prosentasi
1	1969/1970	Rp. 188.000.000,—	Rp. 5.553.000.000,—	3,3 %
2	1970/1971	„ 205.685.000,—	„ 5.850.000.000,—	3,5 %
3	1971/1972	„ 205.685.000,—	„ 6.650.000.000,—	3,0 %
4	1972/1973	„ 300.000.000,—	„ 8.800.000.000,—	3,4 %
5	1973/1974	„ 574.053.000,—	„ 9.840.000.000,—	5,8 %
6	1974/1975	„ 2.181.246.000,—	„ 24.648.000.000,—	8,8 %
7	1975/1976	„ 3.555.000.000,—	„ 50.544.000.000,—	7,0 %
8	1976/1977	„ 6.908.869.100,—	„ 69.722.604.100,—	9,9 %
9	1977/1978	„ 8.909.652.500,—	„ 86.244.325.000,—	10,3 %
10	1978/1979	„ 10.247.000.000,—	„ 117.553.000.000,—	8,7 %

**PERBANDINGAN ANGGARAN RUTIN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

I.	<u>1969/1970</u>			
	Rutin	: Rp.	295.579.000,—	
	Belanja Pegawai	: „	219.632.000,—	74,3 %
	Belanja Non Pegawai	: „	75.947.000,—	25,6 %
II.	<u>1970/1971</u>			
	Rutin	: Rp.	308.579.600,—	
	Belanja Pegawai	: „	230.424.500,—	74,6 %
	Belanja Non Pegawai	: „	78.155.100,—	25,3 %
III.	<u>1971/1972</u>			
	Rutin	: Rp.	223.023.400,—	
	Belanja Pegawai	: „	95.703.400,—	42,9 %
	Belanja Non Pegawai	: „	127.320.000,—	57,0 %
IV.	<u>1972/1973</u>			
	Rutin	: Rp.	360.585.200,—	
	Belanja Pegawai	: „	175.465.200,—	48,6 %
	Belanja Non Pegawai	: „	185.120.000,—	51,3 %
V.	<u>1973/1974</u>			
	Rutin	: Rp.	509.564.600,—	
	Belanja Pegawai	: „	235.866.600,—	46,2 %
	Belanja Non Pegawai	: „	273.697.800,—	53,7 %
VI.	<u>1974/1975</u>			
	Rutin	: Rp.	695.849.200,—	
	Belanja Pegawai	: „	362.249.200,—	52,0 %
	Belanja Non Pegawai	: „	333.600.000,—	47,9 %
VII.	<u>1975/1976</u>			
	Rutin	: Rp.	1.191.004.000,—	
	Belanja Pegawai	: „	607.953.000,—	
	Belanja Non Pegawai	: „	583.051.000,—	48,9 %
VIII.	<u>1976/1977</u>			
	Rutin	: Rp.	775.737.000,—	
	Belanja Pegawai	: „	322.626.000,—	41,5 %
	Belanja Non Pegawai	: „	435.111.000,—	58,5 %

IX. 1977/1978

Rutin	:	Rp. 1.047.331.000,—	
Belanja Pegawai	:	„ 549.564.000,—	52,4 %
Belanja Non Pegawai	:	„ 497.767.000,—	47,5 %

X. 1978/1979

Rutin	:	Rp. 1.174.952.000,—	
Belanja Pegawai	:	„ 575.755.000,—	49,1 %
Belanja Non Pegawai	:	„ 599.197.000,—	50,9 %

HASIL PELAKSANAAN PELITA BIDANG KEBUDAYAAN

No.	Rehabilitasi dan Pemugaran	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	Jumlah 73/74 - 78/79	Rata-rata tiap tahun	Ket.
1.	Rehabilitasi Kepurbakalaan dan Peninggalan Sejarah Nasional	2	13	22	33	53	109	232	38	
	a. Taman Purbakala	—	—	4	—	6	12	22	3	
	b. Komplek/candi/Situs Kepurbakalaan	1	2	4	9	11	42	69	11	
	c. Keraton/Puri	1	3	3	—	—	66	13	2	
	d. Pura/Masjid	—	5	9	21	22	23	80	13	
	e. Rumah Adat	—	—	1	1	1	7	10	2	
	f. M a k a m	—	—	1	1	7	10	19	3	
	g. I s t a n a	—	3	—	—	4	3	10	2	
	h. Gedung Bersejarah	—	—	—	1	2	6	9	1	
2.	Museum	2	9	—	4	8	3	26	4	
3.	Pusat Kebudayaan	6	3	3	—	11	3	26	4	
4.	Balai Penyelamatan Benda Purbakala	—	1	3	—	—	—	4	1	
5.	Sekolah/Akademi Kesenian	7	1	—	—	—	—	8	1	
6.	Sasana	—	2	5	4	—	—	11	2	

HASIL PENERBITAN TENTANG KEBUDAYAAN DAN BAHASA

No.	Jenis Penerbitan	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	Jumlah 73/74 - 78/79	Rata-rata tiap tahun	Keterangan
1.	Monografi daerah	2000 ex	1200 ex	10800 ex	6000 ex	—	—	30800 ex	5133 ex	
2.	Cerita rakyat, roman sejarah/album seni	—	21 nask.	73 nask	67 nask	20 nask	5 nask	186 nask	31 nask	
3.	Majalah	2000 ex	1800 ex	2400 ex	120000 ex	120000 ex	120000 ex	366200 ex	61033 ex	
4.	Majalah Arkeologi	—	3000 ex	3000 ex	8000 ex	6000 ex	6000 ex	26000 ex	4333 ex	
5.	Majalah Bahasa dan Sastra	—	3000 ex	3000 ex	3000 ex	4000 ex	—	13000 ex	3250 ex	
6.	Majalah Pelajaran Bahasa dan Sastra	—	3000 ex	3000 ex	3000 ex	4000 ex	—	13000 ex	3250 ex	
7.	Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra	6000 ex	16000 ex	18000 ex	32000 ex	84000 ex	130 nask	156000 ex	26000 ex	
8.	Biografi Pahlawan	—	—	14 nask	24 nask	14 nask	23 nask	75 nask	12 nask	
9.	Buku Petunjuk Potensi Wisata Budaya	—	—	4 nask	6 nask	6 nask	13 nask	28 nask	4 nask	
10.	Daftar Inventaris dan Pengetahuan Teknis ttg Sejarah & Kepurbakalaan	—	—	—	—	—	7000 ex	7000 ex	1166 ex	
11.	Majalah Penelitian dan Pengajaran	—	—	—	—	—	78000 ex	78000 ex	13000 ex	
12.	Hasil Penelitian Calon Pahlawan Nasional	—	—	6 nask	6 nask	6 nask	6 nask	24 nask	4 nask	
13.	Hasil Penelitian Sejarah & Budaya	8 nask	—	—	41 nask	117 nask	142 nask	308 nask	51 nask	
14.	Film	4 judul	3 judul	7 judul	15 judul	16 judul	7 judul	52 judul	8 judul	
15.	Slide	2 judul	2 judul	3 judul	3 judul	3 judul	3 judul	16 judul	2 judul	
16.	Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan	—	8000 ex	8000 ex	8000 ex	8000 ex	—	32000 ex	8000 ex	
17.	Pedoman Umum Pembentukan Istilah	—	—	2000 ex	8000 ex	8000 ex	—	32000 ex	8000 ex	
18.	Intonation	—	2000 ex	—	—	—	—	2000 ex	—	
19.	Politik Bahasa Nasional I	—	—	—	3000 ex	—	—	3000 ex	—	
20.	Politik Bahasa Nasional II	—	—	—	3000 ex	—	—	3000 ex	—	
21.	Pedoman Penulisan Tata Bahasa	—	—	—	—	3000 ex	—	3000 ex	—	
22.	Kamus Umum Bahasa Indonesia	—	—	—	10000 ex	12000 ex	—	22000 ex	—	
23.	Pedoman Ejaan Bahasa Bali Yang Disempurnakan	—	—	—	—	13000 ex	—	13000 ex	—	
24.	Pedoman Ejaan Bahasa Sunda Yang Disempurnakan	—	—	—	—	13000 ex	—	13000 ex	—	
25.	Pedoman Ejaan Bahasa Jawa Yang Disempurnakan	—	—	—	—	13000 ex	—	13000 ex	—	
26.	Kamus Bahasa Angkara - Indonesia	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	
27.	Kamus Bahasa Banjar - Indonesia	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	
28.	Kamus Bahasa Biak - Indonesia	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	
29.	Kamus Bahasa Indonesia - Bali	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	
30.	Kamus Dialek Jawa Banten - Indonesia	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	
31.	Kamus Bahasa Madura - Indonesia	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	
32.	Kamus Bahasa Mandar - Indonesia	—	—	—	—	2000 ex	—	2000 ex	—	

**REKAPITULASI ANGGARAN REPELITA III (1979/80 - 1983/84)
KEBUDAYAAN NASIONAL**

(dalam ribuan rupiah)

Program	Repelita III 1979/80 - 1983/84	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1. Pengembangan Umum Kebudayaan	7.672.286,00	1.384.727,00	1.482.160,00	1.493.166,00	1.597.344,00	1.714.899,00
2. Kepurbakalaan, Kesenjaraan dan Permuseuman.	71.003.401,00	13.039.129,50	14.154.749,00	14.529.866,50	14.884.673,00	14.394.983,00
3. Kesenian. 1)	34.052.396,30	5.780.800,74	6.288.301,26	6.925.801,78	7.198.021,26	7.859.471,26
4. Kebahasaan dan Kesastraan	9.623.221,75	1.539.882,00	1.691.781,00	1.927.155,00	2.125.816,00	2.338.587,75
5. Perbukuan dan Perpustakaan. 2)	12.477.777,50	2.415.322,50	2.419.279,50	2.557.732,50	2.525.474,50	2.559.958,50
J U M L A H	134.829.082,55	24.159.861,74	26.032.270,76	27.433.721,78	28.331.328,78	28.867.899,51

1) Belum termasuk pembiayaan Wisma Seni Nasional
(Pro Memori)

2) Belum termasuk pembiayaan Perpustakaan Nasional
(Pro Memori)

REKAPITULASI ANGGARAN REPELITA III (1978/80 - 1983/84)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMUM KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

Sub Program/Kegiatan	Repelita III 1979/80 - 1983/84	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1. Mengembangkan Kebijakan- naan Perencanaan & Koordi- nasi	2.717.936,0	558.527,0	545.660,0	520.266,0	542.544,0	550.939,0
2. Pengembangan Media Kebu- dayaan	3.499.000,0	567.000,0	662.000,0	683.000,0	750.000,0	837.000,0
3. Pemantapan Sistem Pem- binaan	585.000,0	117.000,0	117.000,0	117.000,0	117.000,0	117.000,0
4. Pembinaan Tehnis dan Pengendalian	870.350,0	142.200,0	157.500,0	172.900,0	187.800,0	209.950,0
J U M L A H	7.672.286,0	1.384.727,0	1.482.160,0	1.493.166,0	1.597.344,0	1.714.899,0

REKAPITULASI ANGGARAN REPELITA III (1979/80 - 1983/84)
PROGRAM KEPURBAKALAN, KESEJAHTERAAN DAN PERMUSEUMAN

(dalam ribuan rupiah)

Sub Program/Kegiatan	Repelita III 1979/80 - 1983/84	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1. Pembinaan & Pemeliharaan Peninggalan Sejarah & Purbakala	15.490.050,0	2.631.500,0	2.887.850,0	3.178.800,0	3.482.700,0	3.313.200,0
2. Peningkatan dan Pengembangan Permuseuman	16.396.850,0	3.111.700,0	3.418.350,0	3.260.000,0	3.460.000,0	3.146.800,0
3. Penelitian & Pencatatan Sejarah & Kebudayaan	8.843.876,0	1.386.925,5	1.525.303,0	1.925.389,5	2.149.492,0	1.856.676,0
4. Pengembangan Sasana Budaya	9.640.000,0	1.575.000,0	1.737.500,0	1.911.500,0	2.103.000,0	2.313.000,0
5. Pemugaran Candi Borobudur	12.950.000,0	2.590.000,0	2.590.000,0	2.590.000,0	2.590.000,0	2.590.000,0
6. Penelitian & Penggalian Purbakala	7.682.625,0	1.744.004,0	1.996.656,0	1.668.177,0	1.099.481,0	1.175.307,0
J U M L A H	71.003.401,0	13.039.129,5	14.154.749,0	14.529.866,5	14.884.673,0	14.394.983,0

**REKAPITULASI ANGGARAN REPELITA III (1979/80 - 1983/84)
PROGRAM PERBUKUAN DAN PERPUSTAKAAN**

(dalam ribuan rupiah)

Sub-Program/Kegiatan	Repelita III 1979/80 - 1983/84	1979/80	1980/81	1981/82	1982/1983	1983/84
1. Perbukuan	4.917.590,0	806.495,0	885.117,0	973.695,0	1.072.047,0	1.180.236,0
2. Perpustakaan ¹⁾	7.560.187,5	1.608.837,5	1.534.162,5	1.584.037,5	1.453.427,5	1.379.722,5
J U M L A H	12.477.777,5	2.415.332,5	2.419.279,5	2.557.732,5	2.525.474,5	2.559.958,5

¹⁾ Belum termasuk pembiayaan Perpustakaan Nasional
(Pro Memori)

**REKAPITULASI ANGGARAN REPELITA III (1979/80 - 1983/84)
PROGRAM KESENIAN**

(dalam ribuan rupiah)

Sub-Program/Kegiatan	Repelita III 1979/80 - 1983/84	1979/89	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1. Pembinaan Kesenian	6.742.000,00	1.216.000,00	1.261.000,00	1.365.000,00	1.415.000,00	1.485.000,00
2. Pengembangan Kesenian ¹⁾	27.310.396,30	4.564.800,74	5.027.301,26	5.560.801,78	5.783.021,26	6.374.471,26
J U M L A H	34.052.396,30	5.780.800,74	6.288.301,26	6.925.801,78	7.198.021,26	7.859.471,26

REKAPITULASI ANGGARAN REPELITA III (1979/80 - 1983/84)
PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

(dalam ribuan rupiah)

Program	Repelita III 1979/80 - 1983/84	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Kebahasaan dan Kesastraan	9.623.221,75	1.539.882,00	1.691.781,00	1.927.155,00	2.125.816,00	2.338.587,75

1). Belum termasuk pembiayaan Wisma Seni Nasional (Pro Memori)

